

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang proses penelitian dan penulisan disertasi dengan judul “Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali”.

Penelitian ini berupaya mencermati keberadaan perempuan Bali dalam proses perubahan global, dan bagaimana mereka mengambil bentuk kesetaraan gender. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian hingga penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berperan memberikan dukungan, saran dan masukan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, teratama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, MA selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan disertasi ini. Beliau dengan penuh perhatian dan tidak mengenal lelah telah menyediakan waktu membimbing, mendorong, dan mendukung penulis menyelesaikan disertasi dalam waktu secepatnya. Demikian pula pada proses penelitian lapangan beliau dengan penuh kearifan telah memberikan arahan dan motivasi tinggi dan membimbing sepenuhnya agar penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Darmawan, SU selaku Ko-Promotor yang memberikan bimbingan dalam penyusunan disertasi ini. Beliau, selalu mendorong dan memberi semangat dalam menuntaskan penyusunan disertasi, serta selalu menanyakan dan memberi jalan substansi mana yang harus masuk dan tidak perlu masuk dalam disertasi ini dan mendorong penuh agar penulisan diserts ini segera dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari, drg. Dipl. DHE. MPA, Direktur Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus sebagai Ko-Promotor,
4. Bapak Prof Dr. V. Rudy Handoko, MS selaku Dosen, Guru Besar dan sekaligus penguji yang telah meluangkan waktu memberikan saran, motivasi. kritik yang konstruktif mulai Ujian Kelayakan.
5. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang sangat berharga selama ujian kelayakan.
6. Bapak Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus sebagai anggota Tim Penguji.
7. Bapak Dr. H. Agus Sukristyanto, MS selaku dosen yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi sekaligus sebagai anggota tim penguji dalam disertasi ini, sehingga kelancaran proses penyusunan penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Ayahanda I Wayan Kerata (alm), Ibunda Ni Ketut Tirtawati yang telah melahirkan mengurus penulis sejak bayi, menggendong, mendidik, membiaya pendidikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis, terima kasih tak terhingga, penulis telah berhutang budi dalam hidup ini, bantuan dan keikhlasan serta budi baik itu hanya Tuhan yang dapat membalasnya yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi S3., Keempat kakak- kakak dan adik yang penulis sayangi : Ir. I Wayan Tirka Laksana, I Made Tirka

Wijaya, I Nyoman Tirka Nurlaba, Mayor Laut (k) dr. I Ketut Tirka Nandaka, Sp.Kj, Mayor Czi, I Made Tirka Nurgaduh dan Nyoman Tirka Arimas.

9. Suamiku tercinta, Ir. Wayan Darma Sedana, MM dan anak-anakku Shinta, Rama dan Laksmi tersayang, yang telah memberikan dorongan dan pengertian, selama penulis menempuh studi, penelitian, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi S3.
10. Rekan sejawat di Perusahaan PT Karya Tangan Indah Bali, khususnya Ni Luh Putu Parmini, Spd, Ni Putu Purbayanthi, ST, AA Dwi Nugraha, ST, Ida Bagus Dharmayuda, SH, I Gusti Ngurah Suteja yang telah mendorong dan mendukung peneliti sehingga tidak kenal lelah untuk menyelesaikannya.
11. Komisaris dan Manajemen PT Multi Reka Realty Bali, Ir. Wayan Darma Sedana, MM dan I Gde Putu Suharto, SP yang dengan begitu tulus memberikan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan Doktor sampai terlaksananya tulisan ini.
12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya seangkatan. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas, mendapatkan kebaikan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penulis mengharapkan kritik saran bagi penyempurnaan disertasi ini. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak.

Bali, 23 Mei 2009

Ni Putu Tirka Widanti

ABSTRACT

Besides giving the positive, the globalization is also giving a negative effect. comes up with the new problem to the country. To overcome this problem, the action of Indonesian women is needed, included the Balinese women. Any kinds of imprisonment tradition, the power of the then have the deviation in following the action which toward the patriarchy system, which must be got correction and revision. Now days Balinese transition period, they seldom in the strategy position, it is because they don't have any in stating the general the women don't participate in the local village community meeting.

In relation to this background it is needed to do the research with the formula as follows:

1. How and why the Balinese empowering women are needed?
2. What and how is the model wise for the Balinese empowering women?

The method which is used to expose this problem is qualitative, the results of this research shows that:

1. The empowering of Balinese women can't get off from the changing in this globalization period. In one side Balinese women inclined to adapt the modern cosmopolitan culture but in other side it is also in process of parochialism. It comes up cause of the transition to local side, especially to the village culture. In other word, the Balinese women in adapting the modern culture are still applying the local tradition value of culture system. Balinese people don't differentiate between women and men, the only different is their function. The Balinese pre-emptive law in family and heritage are really driven out of course. It only emphasize heritage to the men, and it must be remember even though the women don't have the heritage, they also didn't be claimed to do the obligation cause of the heritage. When the equality principal be translated in Bahasa as equality (not must be the same)
2. It has been changing between the Balinese women perceptions and conception about their self concept. Along this they don't do the expressive attractive movement. The changing of culture and attitude has been done evolutionary which is adaptive to the global influence. That changing didn't change the culture system which they hold and act, the changing happened on their attitude with natural movement.
3. The result of this research is producing a model of women's empowerment policy which base on local wisdom, bottom up, democrat participation and will influence to all stakeholders. With this model the ability will be more adaptive, flexible and acceptable by the Balinese community in order that empowering more effective.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PANITIA PENGUJI.....	ii
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DATAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	17
BAB IV	
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
BAB V	
PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi selain memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif dengan timbulnya berbagai masalah baru bagisuatu negara. Untuk mengatasi masalah yang timbul, dibutuhkan peran perempuan Indonesia, termasuk perempuan Bali. Berbagai ikatan yang mengungkung kuasa kelahiran yang kemudian berjalan menyimpang dalam melaksanakan peran yang mengacu pada sistem patriarki, harus dikoreksi dan direvisi. Peran perempuan perempuan harus diangkat pula dalam komunitas banjar. Namun, bagi perempuan Bali, mengambil peran itu tidak mudah karena dalam tatanan adat masyarakat Bali, aktor utama dalam struktur adat adalah anak laki-laki, yang dikenal sebagai *purusa*. Sekuat apa pun perjuangan perempuan, hasilnya tetap di posisi pinggir, kecuali jika dilakukan perombakan.

Pemberdayaan perempuan kadang-kadang menemui kendala sosiokultural yang memojokkan para perempuan. Perempuan justru menghadapi himpitan tekanan denganKepasrahan dan menanggapinya sebagai hal yang wajar bagi mereka. Peluang sertatantangan perempuan Bali dalam mengejar kemajuan agar sejajar dengan kaum laki-lalirupanya masih menjadi keluhan. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perempuanBali masih terbelakang dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, karier,pekerjaan, dan dunia politi. Perempuan Bali harus berusaha keras untuk bisa berperandan “tampak” dalam kehidupan sehari-hari. Jika perempuan Bali ingin berperan lebihjauh lagi, diperlukan kemampuan berpikir strategis, seperti dalam dunia politik yangmerupakan ruang-ruang yang memerlukan kapasitas itu atau dalam ranah pengambilkeputusan. Orang yang bisa mencapai tataran berpikir strategis adalah orang yangterlatih berpikir dan memiliki kemerdekaan dan keberanian menyatakan pendapat,sebagaimana disebutkan dalam Weda.

Perempuan Bali saat ini dalam masa transisi. Mereka jarang berada di posisistrategis ini karena mereka tidak punya keberanian menyatakan pendapat. Adat mengaturbahwa perempuan tidak punya hak suara, termasuk hak suara dalam *pasamuhan* (rapatyang berhubungan dengan adat atau keagamaan di Bali). Pada umumnya kaumperempuan tidak ikut dalam rapat pada tingkat desa pakraman dan banjar, sehingaurusan desa/publik diputuskan oleh kaum laki-laki tanpa suara perempuan ikutmenentukan. Pada zaman dahulu mungkin hal itu baik karena situasi zaman memangmenghendaki perempuan berada dalam posisi seperti itu. Namun, ketika zaman berubah,dan justru membutuhkan orang-orang yang bisa “bicara” (terbuka), tradisi yang memilikiaturan demikian harus dikaji ulang untuk mengikuti perubahan zaman, Hal ini dapat dimengerti sebab dampak keterbungkaman (tidak pernah bicara) itu sangat besar, dan akhirnya terbukti bahwa ketika peran mereka dibutuhkan, perempuan Bali benar-benar tidak bisa “bicara”.

1.2, Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan masalah penelitian inisebagai berikut:

1. Bagaimana dan mengapa pemberdayaan perempuan Bali diperlukan?
2. Apa dan bagaimana model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali?

1.3, Tujuan Peneliti

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan pemberdayaan perempuan dalam perubahan budaya di Bali yang dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender.
2. Menyusun model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali dalam perubahan budaya dari perspektif gender.

1.4, Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis temuan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebuah konsep perubahan sosial bahwa pemberdayaan kelompok marginal di suatu masyarakat hendaknya mempertimbangkan kearifan lokal (agama, budaya). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat memanfaatkan Teori Keseimbangan (Equilibrium Theory), tidak harus melalui perjuangan kelas model Marxis dan atau melalui mode rasionalisme Weber.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tentang kebijakan publik, terutama pada aspek studi pemberdayaan perempuan dari perspektif gender. Adalah fakta akademis bahwa kajian pemberdayaan perempuan dengan mencoba berbagai perspektif, pendekatan, dan metodologi- relatif masih kurang semarak, sehingga masih perlu terus dilakukan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang dan stakeholders terkait dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dengan pengarusutamaan gender pada masyarakat Bali.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penyadaran kepada masyarakat Bali bahwa gagasan pemberdayaan perempuan yang mereka perjuangkan tidak harus silau dengan gemerapnya pandangan-pandangan global. Temuan penelitian ini justru dapat makin menokohkan keyakinan masyarakat Bali bahwa kearifan lokal berbasis agama dan adat budaya sungguh bermanfaat secara praktis guna memperahankan dan meningkatkan keharmonisan relasi gender di dalam kehidupan, baik di sektor domestik maupun sektor publik. Pada akhirnya, kondisi demikian diharapkan dapat mempercepat pemberdayaan perempuan Bali di ranah ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan politik.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa saaran teropong penelitian penulis diantara penelitian terdahulu adalah bagaimana implementasi kebijakan publik dalam bidang pemberdayaan perempuan. Perbedaan penelitian ini diantara terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Mapping Penelitian Terdahulu

Penelitian	Jadwal penelitian	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
Cozens, J. West, M. (Eds), 1991	Women and Politics	Perempuan dalam pekerjaan, psikologi dan perspektif organisari	Eksplanatoris	Politik didominasi oleh laki-laki sedangkan perempuan mengurus urusan domestik/rumah tangga
Davidson dan Cooper, (1992)	Women on busniss	Adanya pandangan tentang rendahnya peran perempuan dalam bisnis	Eksplanatoris	Ternyata peran perempuan mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup dramatis, tidak hanya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, tetapi juga dibelahan dunia lain.
Margaret Mead and Samoa (1998)	Women and Culture in Samoa	Posisi wanita setara dengan laki-laki karena kultur stempat memungkinkan parawanita untu memiliki lebih dari satu	Deskripyif-Eksploratif	Bahwa kultur masyarakat memungkinkan para wanita berperan sepertihalnya laki-laki yang dalam hal ini lebih

		kekasih		disebabkan oleh sistersosial budaya masyarakat yang melingkupinya .
Nadia Hijab (1988)	Womenpower	Pendidikan dan gaji berpengaruh pada kekuasaan perempuan	Kuantitatif	Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan gaji kerja wanita, maka akan semakin tinggi dan besar kekuasaan yang dimiliki.
Wibowo (2002)	Kesenjangan Gender dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	Ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.	Kuantitatif	Bhw pelaksanaan program KB yang lebih diarahkn ke kematian ibu, sehingga ibu menjadi sasaran dan terbatasnya sarana pelayanan pria.
Swarsi (1985)	Perempuan dalam Hukum Hindu	Masih adanya persepsi masyarakat tentang dikotomi gender yaitu perbedaan ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan.	Deskriptif Kualitatif	Perempuan telah mendapat kedudukan tinggi dan istimewa secara normatif walaupun secara realistas masih ada ketimpangan terkait dengan

				sistem sosial.
Eri Seda (2002)	Mainstream Gender ke dalam Gerakan Filantropi	Kebijakan pemerintah yang lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan belum menjadi prioritas dalam pembangunan.	Deskriptif Eksploratif	Bahwa problematika perempuan di Indonesia dan kawasan Asia pada umumnya masih terkungkung budaya patriarki.
Bachtiar Kurniawan A.S (2005)	Peran Perempuan dalam Filantropi dan Masyarakat Sipil	Mengenai peranan yang dimainkan oleh perempuan dalam membentuk dan mempengaruhi pertumbuhan <i>civil society</i> (masyarakat sipil) melalui aktivitas filantropi	Deskriptif Eksploratif	Bahwa beragam sistem politik dan keagamaan melalui pendekatan peran perempuan memperlihatkan adanya perubahan persepsi dan konsepsi dirinya tentang konsep diri dalam memknai ranah publik
Anik Farida, Siti Musdah Mulia (2005)	Perempuan dan Politik	Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan . Saat berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuanmen galami lebih banyak hambatan	Kualitatif	Perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan, memberi perintah yang jelas dan mau menindaklanjuti, memeriksa kembali setiap

		ketimbang laki-laki. Mengapa?		pernyataan demi keakuratan, menjaga integritas pribadi, dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu juga tetap dituntut untuk bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat.
I Nyoman Sukiada (2002)	Politik Gender Orde Baru dan Keterpinggiran Perempuan Bali dalam Kancan Politik	Terjadi ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, kesewenang-wenangan laki-laki dalam hal perkawinan poligami.	Deskriptif kualitatif	Perempuan disarankan untuk meningkatkan pendidikannya sehingga tidak diemehkan dalam masyarakat.
Jasmin Oka (2002)	Garis Baru bagi Perjuangan Wanita Indonesia	Tahapan Perjuangan yang dilakukan kaum wanita di dunia	Deskriptif Kualitatif	Bahwa perjuangan kaum wanita Indonesia adalah perjuangan yang bukan semata-mata di bidang

				kewanitaan saja tetapi lebih mengarahkan perjuangan menuju masyarakat yang sosialis.
Luh Ketut Suryani (2003)	Perempuan Bali Dalam Perubahan	Masyarakat Bali mendapat banyak pengaruh dari luar diantaranya kemajuan teknologi, globalisasi informasi, budaya asing dan domestik. Beberapa perubahan terjadi di masyarakat yang mengarah ke perubahan berifat baik positif maupun negatif.	Deskriptif	Keadaan ini tentunya mempengaruhi kehidupan perempuan Bali terutama setelah perempuan memperoleh pendidikan sama dengan kaum laki-laki. Perempuan Bali yang sudah biasa berperan ganda dalam kehidupannya akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan pendidikannya.
Ni Putu Tirka Widanti (2008)	Model kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali	Perubahan budayan sianggap sebagai penghambat Pemberdayaan	Kualitatif	Bahwa telah terjadi perubahan persepsi dan konsepsi perempuan

		perempuan di Bali		Bali tentang konsep dirinya. Sejauh ini mereka tidak melakukan gerakan secara ekspresif dan atraktif. Perubahan budaya dan sikap perempuan terjadi secara evolusioner yang adaptif terhadap pengaruh global.
--	--	-------------------	--	--

Lalu, apa yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu? Seperti tersurat dalam judul, penelitian penulis (2009), mengangkat ihwal kebijakan publik untuk memberdayakan perempuan di tengah-tengah perubahan budaya Bali yang diteropong dari perspektif gener. Di sini jelas bahwa penelitian penulis berada di wilayah disiplin Kebijakan Publik (*Public Policy*). Sasaran teropong penelitian penulis adalah bagaimana implementasi kebijakan publik dalam bidang pemberdayaan perempuan.

2.2 Kebijakan Publik Dan Implementasi

Kebijakan publik merupakan refleksi atas nilai-nilai sosial yang berkembang dikalangan masyarakat. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam studi kebijakan public adalah Herbert Simon Menurut David Easton, kebijakan merupakan hasil dari proses politik. Kebijakan akan selalu disesuaikan dengan konteks bidangnya misalnya kebijakan Pertanian untuk menangani masalah pertanian seperti impor beras atau kebijakan sumberdaya energi untuk menangani mulai langkanya bahan bakar minyak.

Pemahaman kebijakan dikemukakan juga oleh Anderson (1979), yang memberikan gambaran bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actors in dealing with a problem or matter concern”*. Dengan demikian, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh Seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Islam), 1984), Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai *“a proposed course of action of person, group or government with a given environment providing obstacles and opportunities with the policy was proposed to utilize an overcome in an effort to reach goal or realize objectives or purpose”*. Dapat dikatakan bahwa kebijakan negara merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu engn mempertimbangkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijkn dalam rangka mencapai tujuan tertentu (federick). Selanjutnya, dengan redaksi yang lebih padt dan

ringkas, Raksasadya (dalam Tjotoamijoyo, 1976, membatasi pengertian kebijakan sebagai (suatu teknik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu).

Upaya merumuskan kebijakan, dapat bersifat perorangan dan dapat juga mencakup berbagai unsur yang terlibat (*stakeholder*). Dengan demikian, kebijakan tersebut menjangkau perorangan atau kelompok, kelompok kecil, maupaun kelompok besar, lembaga swasta atau pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, para ilmuwan, intelektual, dan sebagainya. Selain itu, luas sempitnya ruang lingkup (*scope*) suatu kebijakan tergantung pada *stakeholders* dalam perumusan, kompleksitas hambatan-hambatan yang akan diwujudkan/ diselesaikan, serta sifat kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan rumusan PBB sebagai berikut:

“Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kuantitatif atau kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana”.

Dalam hal ini, bentuk, sifat, jenis, dan ruang lingkup (**scope**) kebijakan sangat banyak, luas, serta sangat kompleks. Maka, untuk pengaturan hubungan masyarakat dengan pemerintah, diperlukan kebijakan publik (*public policy*) untuk menyelesaikan suatu keadaan yang kritis yang ada dalam kehidupan, yang merupakan upaya kolektif untuk memberikan layanan (*service*) terbaik bagi masyarakat dalam satu bidang tertentu.

Pemberian layanan (*service*) terhadap publik berangkat dengan perwujudan secara riil dari suatu kebijakan. Pemberian layanan publik juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak dari pelaksanaan kebijakan, maka, kebijakan publik (*publik policy*) harus dapat dilaksanakan atau diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, implementasi sebagai sebuah proses, menurut Nicholas Henry (1992), menunjuk pada perjuangan setiap aktor untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Di sisi ini, dengan permainan bahasa kekuasaan, kelompok elit kekuasaan dapat secara leluasa mentransformasikan kepentingan pribadi tampak seolah-olah seperti kepentingan publik. Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang dimaksud dengan kebijakan publik dibatasi pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional dengan menimbangbahwa:

- a. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.
- b. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dan dalam rangka mendorong mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan instruksi presiden.

2.3 Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan yang lahir pada tahun 1990-an, merupakan bentuk kritik terhadap kelemahan konsep pembangunan (*development*) yang dipopulerkan sejak 1950-an, pasca perang Dunia II. Meskipun konsep pembangunan sangat populer sepanjang paruh kedua abad XX, sehingga ada yang menyebut abad XX sebagai *The Age of Development*, konsep ini banyak menuai kritik. Pembangunan yang dijalankan ternyata hanya mampu menyejahterakan segelintir orang (negara maju), namun sebagian besar tetap dalam kondisi miskin (terutama di negara-negara berkembang di Dunia Ketiga).

Menurut Webster (dalam Kartasasmita, 1996), kata *empower* mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah '*to give power or authority to*' dan pengertian kedua adalah '*to give ability to or enable*'. Dalam pengertian pertama, kata ini diartikan sebagai 'memberi kekuatan', 'mengalihkan kekuatan', atau 'mendelegasikan otoritas' kepada pihak lain. Dalam pengertian kedua, kata tersebut diartikan sebagai 'upaya memberi kemampuan atau keberdayaan' kepada pihak lain.

Kata *empowerment* berasal dari kata dasar *empower* yang berarti '*to invest with power, especially legal power or official authority*', atau '*to equip or supply with an ability*'. Jadi, *empower* berarti 'menguasakan', 'memberi kuasa', atau 'memberi wewenang sehingga menjadi objek yang berkuasa'. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan, dan kreativitas. Berbeda dengan konsep pembangunan, konsep pemberdayaan mengacu pada pentingnya proses sosial selama program berlangsung. Jadi, konsep pemberdayaan lebih berorientasi pada proses, bukan hasil.

Teori pemberdayaan sudah cukup berkembang lama berkembang dikalangan pemikir, perancang, dan pelaksana perubahan sosial (*social change*). Selama kurang lebih 20 tahun para ahli kemasyarakatan mengembangkan teori pemberdayaan (rappaport, 1987).

Meskipun banyak ragam kecenderungan, aksentuasi, dan bahkan perspektif, setidaknya ada tiga asumsi yang secara seragam diterima dan dijalankan oleh para pakar dan praktisi teori pemberdayaan sebagai berikut:

1. Bentuk pemberdayaan akan berlainan untuk orang yang berbeda. Perspektif, keahlian, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja akan berbeda antara remaja yang belum menikah dan wanita dewasa yang sedang hamil. Bentuk pemberdayaan antara perempuan petani dan perempuan buruh juga berbeda. Latar belakang, situasi, dan kematangan seseorang sangatlah menentukan.
2. Pemberdayaan yang berbeda bentuk untuk konteks yang berlainan. Persepsi, keahlian, dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu akan berbeda antar pekerja di organisasi otoritatif dan pekerja di organisasi partisipatif. Inisiatif pekerja pada situasi pertama (organisasi otoritatif) ditekan di tingkat paling rendah, sementara pada situasi kedua (organisasi partisipatif) kreativitas dan dinamika pekerja justru didorong untuk berkembang semaksimal mungkin.
3. Pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan berjalannya sang waktu. Seseorang dapat merasa terberdayakan pada suatu saat, tetapi merasatidak terberdayakan pada waktu lain, bergantung pada kondisi yang mereka hadapi pada suatu waktu. Dalam hal demikian waktu bagaikan rezim penguasa penentu nasib.

2.4 Konsep Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam pembahasan mengenai gender, kesetaraan gender, dan keadilan gender, dikenal adanya dua teori, yaitu (1) Teori Nature dan (2) Teori Nurture. Dalam perjalanannya dikembangkan satu konsep teori yang diilhami oleh dua teori tersebut yang merupakan hasil kompromistis yang menciptakan keseimbangan yang disebut dengan Teori Equilibrium. Selanjutnya, ketiga teori secara rinci diuraikan sebagai berikut.

2.4.1 Teori Nature

Teori Nature sering diterjemahkan sebagai Teori Alam atau Teori Kodrat. Menurut Teori Nature, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, suatu kenyataan biologis, sehingga perbedaan itu harus diterima, tidak perlu digugat, apalagi ditolak. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda, Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan Teori Nature, lalu beralih ke Teori Nurture. Akan tetapi, ternyata Teori Nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerja sama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial terdapat pembagian kerja (*division of labor*) secara seksual. (Budiman, 1981; 1991). Begitu pula dalam kehidupan keluarga, harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

2.4.2. Teori Nurture

Teori Nurture sering diterjemahkan sebagai Teori Kebudayaan (Budiman, 1981). Menurut Teori Nurture, perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan selalu tertinggal dan terabaikannya peran dan kontribusi perempuan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara.

Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, sedang perempuan ditempatkan sebagai proletar. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar persamaan (*sameness*) dengan konsep 50:50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas, kesamaan sempurna), Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran Karl Mark (1818-1883). Mengapateori ini memakai pendekatan konflik dari Karl Mark tidak terlalu mengejutkan sebab terminologi yang dipakainya, misalnya proletar dan borjuis sudah menunjukkan bahwa teori ini terpengaruh secara kuat oleh bayang-bayang Marxisme. Akan tetapi, jika dipijik, sebagai teori, Teori Nurture amat konsisten memegang prinsip bahwa ketimpangan gender yang melahirkan ketidakadilan sosial sesungguhnya merupakan akibat dari konstruksi sosial.

Dengan kata lain, perbedaan peran, kewajiban, dan nasib antara perempuan dan laki-laki bukanlah kodrat, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial. (budiman 1981: Fakih, 2005). Karena konstruksi sosial itu bukan kodrat melainkan diciptakan masyarakat, justru disini orang harus yakin bahwa perbedaan gender dapat berubah dan diubah-ubah tentu tidak sia-sia untuk diperjuangkan.

Randall Collin (1987), beranggapan bahwa keluarga adalah wadah legal pemaksaan suami sebagai pemilik terhadap istri sebagai abdi. Margareth Eichles beranggapan bahwa keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar). Bagi proletar, tidak ada pilihan kecuali harus melancarkan perjuangan menyingkirkan penindas demi mencapai kebebasan dan persamaan. Karena itu, Teori Nurture melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis kominus yang menghilangkan strata hierarkis penduduk untuk mencapai situasi “ sama rata, sama rasa” (egalitarian)

2.4.3 Teori Equilibrium (Keseimbangan)

Di samping kedua teori sebelumnya, terdapat satu teori lagi yang lahir dari kesediaan untuk menciptakan suasana kompromitis yang dikenal dengan Teori Keseimbangan (Equilibrium Theory). Teori ini menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam relasi tersebut Keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan harus diperhitungkan keseimbangan peran perempuan dan laki-laki. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan merupakan hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan komplementer yang saling melengkapi.

Teori keseimbangan jungs memandang bahwa berbagai keragaman (faktor biologis, etnis, aspirasi, pilihan, budaya, dsb) pada hakikatnya adalah realitas kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan, sekaligus kelemahan. Kedua pihak dengan demikian, harus bekerja sama untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangannya (cf. Tinker, 1990, wahyuningsih 1993, Wijaya, 1995).

2.5 Teori Perubahan Sosial dan Budaya

2.5.1. Teori Perubahan Sosial

Karl Marx (1844), pada dasarnya menyoroti perubahan modal produksi, sehingga melahirkan perubahan pada berbagai aspek. Sumber perubahan kebudayaan (tentu saja perubahan sosial termasuk didalamnya) disebabkan oleh faktor material, yaitu ekonomi. Perspektif materialistis bertumpu pada pemikiran Marx yang menyatakan bahwa kekuatan produksi berperan penting dalam membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Marx memberikan penjelasan bahwa masa teknologi masih terbatas pada kunci angain memberikan bentuk tatanan masyarakat yang feodal, sedangkan masa mesin uap mengubah tatanan masyarakat menjadi bercirikan industrial kapitalistis. Perspektif ini melihat bahwa bentuk pembagian kelas-kelas ekonomi merupakan dasar anatomi suatu masyarakat. Dengan ini

Marx memperkenalkan Matrealisme Historis (*Historical Matrealism*) yang menyakini bahwa kondisi material manusia menentukan kondisi mental psikologisnya (cf Ritzer 1988: 309-310; Tong 1998), bukan kondisi mental yang menentukan perilaku material manusia, tetapi justru kondisi material yang menentukan perilakunya.

Teori Matrealisme Historis tentang perkembangan masyarakat bertujuan untuk menjelaskan proses sosialisasi pada masyarakat. Teori ini menjelaskan peranan aspek sejarah masa lalu terhadap kondisi masyarakat saat ini. Konsep dasar teori ini adalah adanya hubungan antara masyarakat, manusia, dan lingkungannya. Menurut Marx terdapat tiga tema menarik ketika seseorang hendak mempelajari perubahan sosial (*social change*), sebagai berikut.

- a) Perubahan sosial menekankan pada kondisi material yang berpusat pada perubahan cara atau teknik berproduksi material sebagai sumber perubahan sosial budaya.
- b) Perubahan sosial utama adalah kondisi material dan cara berproduksi dan hubungan sosial serta norma-norma kepemilikan.
- c) Manusia menciptakan sejarah materialnya sendiri; selama ini mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. Kemampuan manusia membentuk sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang telah ada.

2.5.2 Teori Perubahan Budaya

Kata *kebudayaan* atau *budaya* sering dikaitkan dengan antropologi. Salah satu definisi kebudayaan dalam antropologi disusun seorang antropolog bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, "Kebudayaan," katanya, "adalah seluruh cara kehidupan masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan". Jadi, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berperilaku, kepercayaan, sikap, dan juga hasil khas kegiatan manusia dalam masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Seperti semua konsep-konsep ilmiah, konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek "di luar sana" yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Konsep-konsep kebudayaan yang dibuat membantu peneliti dalam melakukan pekerjaannya, sehingga ia tahu apa yang harus dipelajari. Salah satu hal yang diperhatikan dalam penelitian antropologi adalah perbedaan dan persamaan makhluk manusia dengan makhluk bukan manusia seperti simpanse atau orangutan yang secara fisiologis mempunyai banyak kesamaan.

Kroeber dan Kluckhohn mengumpulkan sedikitnya 150 definisi tentang kebudayaan yang diklarifikasikan ke dalam tujuh definisi pokok, yaitu (1) definisi deskriptif, (2) definisi historis, (3) definisi normatif, (4) definisi psikologis, (5) definisi struktural, (6) definisi genetik, (7) definisi yang tidak lengkap (Kroeber, 1952:81-152). Definisi itu ternyata tidak berbeda jauh secara substantif dan masih cenderung mengikuti definisi yang dibuat oleh Tylor (1871) yang memberikan batasan kebudayaan (*culture or civilization*) sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat kebiasaan, kemampuan, dan kebiasaan yang dibutuhkan manusia sebagai anggota masyarakat

(Kroeber 1952). Dengan demikian, kebudayaan meliputi seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat kebendaan material maupun kejiwaan spiritual.

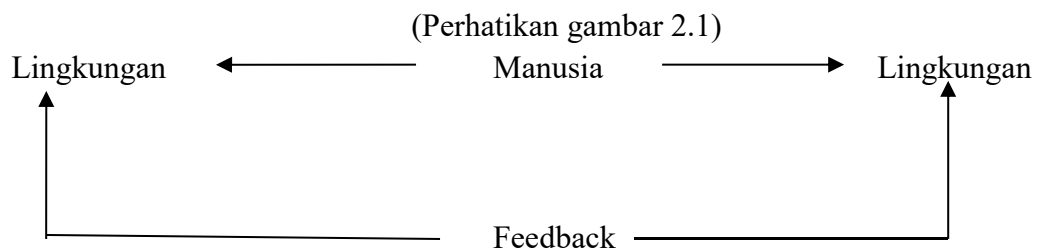
Pendekatan antropologis tentang budaya setidaknya mencakup dua pendekatan. Pertama pendekatan pola proses (*proces-partner theory, culture pattern as basic*) yang dibangun oleh Frans Boas dan Alfred L Kroeber. Kedua pendekatan struktural fungsional (*structural-functional theory, social structural as basic*) yang dikembangkan oleh Malinowski dan Radcliffe-Brown (1920). Kedua teori ini tercakup dalam definisi budaya dalam arti luas yang meliputi baik 'kebudayaan' (*culture*) maupun 'peradaban' (*civilization*) menurut Edward Burnett Tylor adalah:

Dengan mengambil pengertian luas dari etnografi, kebudayaan atau peradaban, demikian menurut Tylor, merupakan hal yang kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, budi pekerti, hukum, adat, dan kemampuan yang lain, serta dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai bagian dari makhluk sosial.

Schein mendefinisikan budaya sebagai "*the set of important assumption (often unstated) that members of a community share in common*". *Assumptions* meliputi kepercayaan (*beliefs*) dan nilai (*values*). Kepercayaan merupakan seperangkat anggapan penting (seringkali tidak disebutkan) bahwa anggota dari himpunan masyarakat yang mempunyai persamaan asumsi dasar tentang dunia dan bagaimana dunia berjalan. *Values* merupakan seperangkat nilai sebagaimana diamati, dan tidak sebagaimana yang mereka katakan, karena yang satu bisa berbeda dengan yang lain. Definisi budaya yang umum, namun operasional, diberikan oleh Schein dalam *Organizational Culture and Leadership* sebagai berikut:

"A patterns of share basic assumption that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relations to these problems"

Manusia dapat diartikan sebagai konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (*genus*) atau seorang individu. Di lingkungan hidupnya ia adalah organisme hidup (*living organism*). Terbentuknya kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk dapat hidup ia membutuhkan sesuatu, suatu alat untuk memenuhi kebutuhan.



Menurut Lynton Keith Caldwell (1964), dalam *Environment: A Challenge for Modern Society*, lingkungan adalah keseluruhan yang mengitari manusia, termasuk sesama manusia. *International Encyclopedia of the Social Science* (1972) membatasi lingkungan sebagai: “*The aggregat of all the external conditions and influences affecting the life and development of an organism*”

2.5.2.1 Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi/Subjektivasi

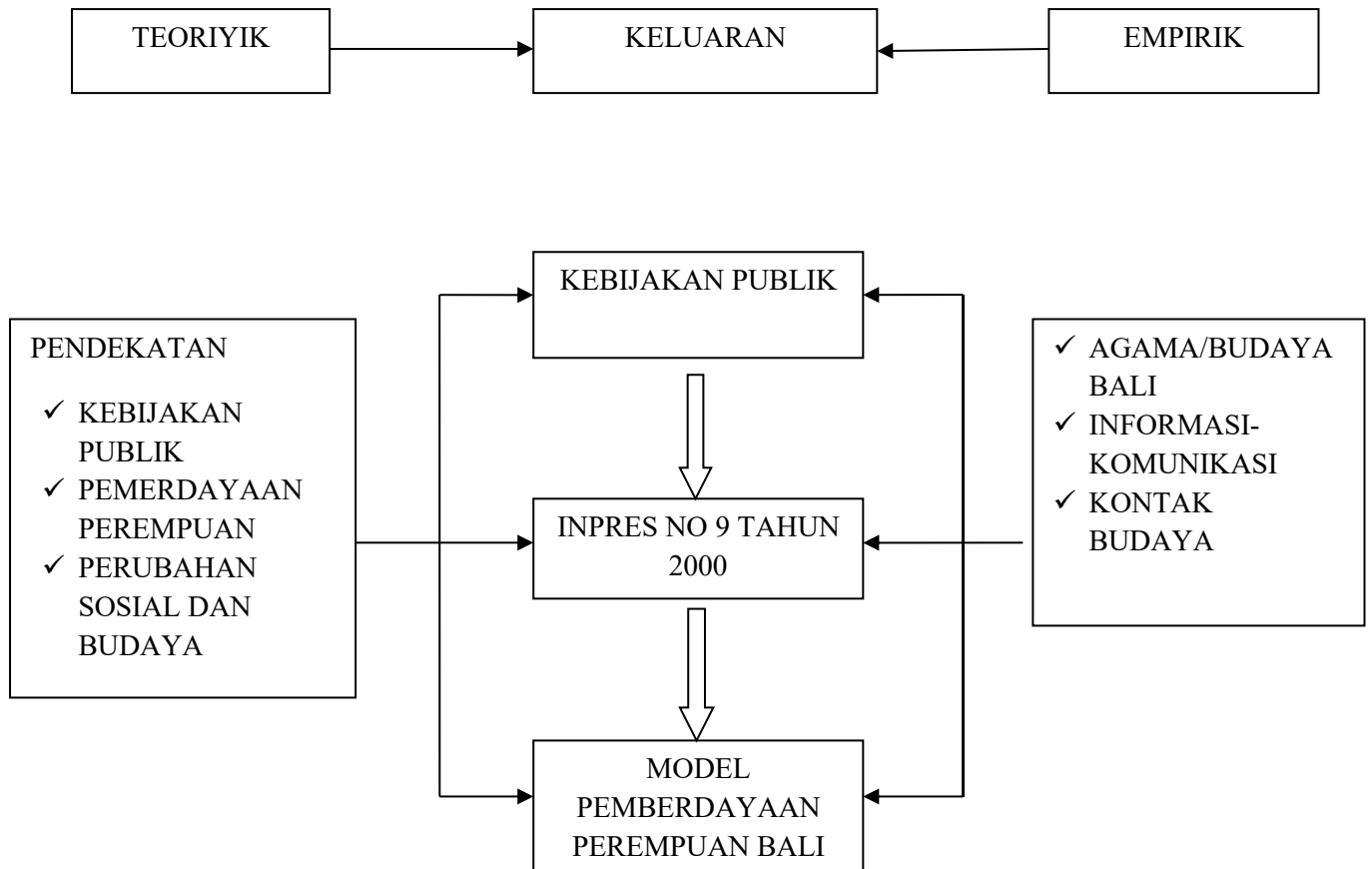
Dewasa ini sulit kiranya untuk menerima pengertian “kebudayaan statis” Kebudayaan merupakan kisah tentang perubahan. Sejarah berisi tentang kreativitas manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada (vanPeursen, 1984), Kebudayaan, dengan demikian, tidak alergi terhadap perubahan.

Untuk memahami dinamika perubahan kebudayaan, hubungan individu dan masyarakat tidak dapat dipahami dalam kerangka kausalitas linear. Pola hubungan individu dengan masyarakat secara hakiki dibentuk oleh tiga momentum proses, yakni: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (dan atau subjektivasi) (Berger, 1991). Secara dialektis, eksternalisasi merupakan proses yang berpasangan dengan internalisasi. Objektivasi merupakan proses yang berpasangan dengan subjektivasi. Kedua proses tersebut bukan kausalitas linear, maka keliru manakala dinyatakan bahwa proses yang satu merupakan sebab dan proses yang lain merupakan akibat. Dalam kerangka pemikiran dialektika fenomenologis, setiap momentum proses merupakan sebab sekaligus akibat, atau akibat sekaligus sebab. Dengan demikian, dinamika kebudayaan manusia dan eksistensi manusia adalah suatu “tindakan penyimbang” terus-menerus antara manusia dan dirinya, antara manusia dan dunianya (Berger, 1991).

2.2, Pembatasan, Pelanggaran, dan Penyesuaian Kebudayaan

Pembatasan kebudayaan biasanya tidak selalu dirasakan oleh para pendukung Suatu Kebudayaan. Hal ini terjadi karena individu-individu pendukungnya selalu mengikuti cara-cara berlaku dan cara berpikir yang telah dituntut oleh kebudayaannya. Pembatasan-pembatasan kebudayaan baru terasa kekuatannya ketika dia ditentang atau dilawan. Pembatasan kebudayaan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu (1) pembatasan kebudayaan yang langsung dan (2) pembatasan kebudayaan yang tidak langsung. Pembatasan langsung terjadi ketika individu/kelompok mencoba melakukan suatu hal yang menurut kebiasaan dalam kebudayaannya merupakan hal yang tidak lazim atau bahkan dianggap melanggar tata kesopanan yang ada. Akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada si pelanggar kalau hal yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang ada. Akan tetapi, apabila hal yang dilakukannya sudah dianggap melanggar tata-tertib yang berlaku di masyarakatnya, diamungkin akan dihukum dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Gambar 2.2

KONSEPTUALISASI PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, bertujuan untuk menyusun model kebijakan pemberdayaan perempuan Di Bali dalam perubahan budaya dari perspektif gender. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif,

Penelitian kualitatif, menurut Taylor (dalam Moleong, 2000), dapat diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut pendapatnya juga, penelitian kualitatif dapat diarahkan pada latar dan individu maupun lembaga atau organisasi tersebut secara *holistic* (utuh). Dengan demikian, individu atau organisasi tidak boleh diisolasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif sering pula disebut inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*) (Lincoln & Guba, 1985), etnografi, interaksionis simbolik (Blumer, 1969), perspektif ke dalam, etnometodologi (Moleong, 2000: 2). Penelitian jenis ini berusaha untuk tidak sekadar menggambarkan temuan di lapangan, tetapi lebih dari itu juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian kualitatif, menurut Moleong (2000), menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi peneliti dengan fokus. Dengan kata lain, penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Dengan hal itu, gapatlah peneliti menentukan lokasi penelitian Fokus penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan masalah yang telah dirumuskan dijadikan sebagai acuan dalam penentuan fokus penelitian. Fokus penelitian menurut Moleong (2000) dipertukan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana pula yang tidak (cf, Kuntjara, 2006; Mulyana, 2001).

3.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan perempuan Bali dari perspektif gender dalam perubahan budaya di Bali. Kebijakan di sini menunjuk pada kebijakan pemberdayaan perempuan sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000. Implementasi kebijakan publik tersebut dilihat dampaknya pada sasaran. Kelompok sasaran ini akan dipilih sebagai informan. Sumber informan terdiri atas berbagai pihak dari berbagai strata masyarakat seperti tokoh keagamaan/tokoh adat, birokrat, pelaku pemberdayaan perempuan di Bali, dan para perempuan Bali.

33. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memahami pemberdayaan perempuan sehubungan dengan perubahan budaya dari perspektif gender di Bali dilakukan di 1 kota, yaitu Denpasar, dan 2 kabupaten yang ada di Provinsi Bali, yaitu Badung dan Tabanan.

Denpasar dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan berikut. Pertama, di samping menjadi ibukota Provinsi Bali, Denpasar secara etnis juga dipadati oleh berbagai penduduk yang datang dari berbagai kabupaten Bali di samping masyarakat yang berasal dari luar Bali, baik dari provinsi lain maupun orang asing. Kedua, sebagai ibu kota provinsi, Denpasar merupakan sentral dan nafas Bali, sebab di kota inilah dapat disaksikan dinamika kultur/budaya yang merepresentasikan budaya Bali.

Dua Kabupaten lainnya, yaitu Badung dan Tabanan, dipilih sebagai pelengkap dan pembanding, yang menunjukkan serta memperkuat budaya yang ada di Bali secara keseluruhan dan khususnya yang terdapat di Denpasar.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Teknik Pengumpulan Data

Untuk Teepalied data dalam penelitian ini, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara dan (2) observasi. Keduanya dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1.1 Wawancara

Menurut Prabowo (1996), wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden/informan. Caranya adalah, bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandani, 1998), dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, pewawancara (interviewer) dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, terbuka, dan masih dapat dikembangkan di lapangan. Biasanya pedoman umum wawancara hanya mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit (cf. Faisal, 2003).

3.4.1.2 Observasi

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan teknik observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan, sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, dibutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti digunakan empat alat bantu, yaitu (1) pedoman wawancara, (2) pedoman observasi, (3) alat perekam, dan (4) instrument kreatif (*human instrument*),

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Pedoman wawancara bisa bersifat terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi di lapangan. Dengan terbuka atau tidak terstruktur, pedoman wawancara dapat diubah, disempurnakan langsung di saat praktik.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau *setting*, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul saat berlangsungnya wawancara. Dalam hal demikian, pedoman observasi dapat diperlakukan sebagai *field notes* (Faisal, 2003).

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan subjek (informan) untuk menggunakan alat itu pada saat wawancara berlangsung.

4. Instrumen kreatif (human instrument)

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini dalam seluruh prosesnya melibatkan peneliti sebagai instrumen (*human instrument*). Sebagai instrumen, peneliti terlibat sepanjang proses penelitian. Dalam wawancara, misalnya, tidak ada instrumen yang paling tepat untuk dapat mendeteksi kejujuran jawaban informan kecuali peneliti (Mulyana, 2001). Instrumen lain (pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam) tidak banyak menolong dalam hal ini. Persepsi peneliti sebagai instrumen menjadi kelaziman dalam riset kualitatif (Faisal, 2003; cf. Kuntjara, 2006).

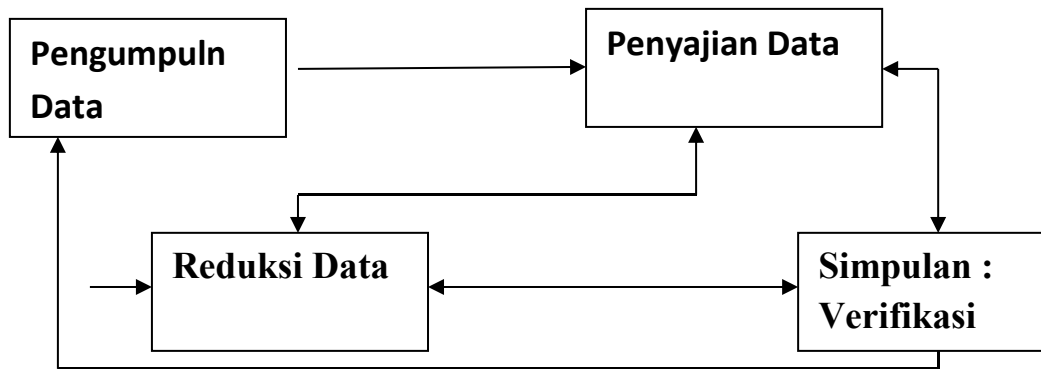
3.6. Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperiukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat kriteria keabsahan tersebut adalah: (1) Keabsahan konstnak, (2) keabsahan internal, (3) keabsahan eksternal, dan (4) keajegan (konsistensi).

3.7. Jenis Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini tidak berusaha menguji suatu hipotesis, akan tetapi berusaha tidak sekedar menggambarkan data hasil penelitian lapangan, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap data sedetail mungkin, sehingga permasalahan menjadi jelas, demikian pula solusi apa yang perlu dilakukan.

Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Menurut Miles & Huberman (1991), salah satu teknik analisis data adalah teknik analisis interaktif—skematis. Dengan teknik ini aktivitas analisis data dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1. Model Analisis Ineraktif (Sumber: Milles & Huberman 1947)

Gambar 3.1 menunjukkan aktivitas analisis data dengan model interaktif dari aktivitas pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan terus kembali pada aktivitas pengumpulan data sepanjang kesimpulan atau verifikasi data dirasakan oleh peneliti belum cukup menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data digambarkan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data (*data collecting*)

Aktivitas pertama dalam melakukan analisis data adalah pengumpulan data (*datacollecting*). Peneliti melakukan pengumpulan data secara terus-menerus sepanjang data yang dikumpulkan masih belum bisa menggambarkan atau mengungkap apa yang diinginkan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang sudah diseleksi dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan tersebut oleh peneliti direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*display*) dimaksudkan untuk memudahkan peneliti memperoleh gambaran secara keseluruhan atas bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk label-label dan uraian naratif.

4. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses berlangsung sejak awal dan selama proses pengumpulan data, Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan-kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Kesementaraan ini makin disempurnakan dan difinalkan melalui dengan makin bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Bali

4.1.1. Kondisi Geografis

Luas keseluruhan wilayah Provinsi Bali adalah 5.632,86 km², atau sekitar 0,29 persen dari Kepulauan Indonesia. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 8°03'40" -8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" -115°42'40" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelah Utara, Laut Jawa;
- (2) Sebelah Timur, Selat Lombok;
- (3) Sebelah Selatan, Samudra Indonesia;
- (4) Sebelah Barat, Selat Bali.

4.1.2. Pemerintahan

Secara administratif, daerah Bali adalah suatu pemerintahan daerah yang disebut Pemerintahan Provinsi Bali. Provinsi Bali dibagi atas 9 (sembilan) Kabupaten dan kota, yang masing-masing merupakan pemerintahan Kabupaten dan Kota yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kesembilan pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut adalah : (1) Pemerintahan Kabupaten Jembrana, (2) Pemerintahan Kabupaten Tabanan, (3) Pemerintahan Kabupaten Badung, (4) Pemerintahan Kabupaten Gianyar, (5) Pemerintahan Kabupaten Klungkung, (6) Pemerintahan Kabupaten Bangli, (7) Pemerintahan Kabupaten Karangasem, (8) Pemerintahan Kabupaten Buleleng, dan (9) Pemerintahan Kota Denpasar.

4.1.3. Demografi

Komposisi penduduk menurut berbagai karakteristik akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek pembangunan. Penduduk adalah aset pembangunan apabila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Sebaliknya, penduduk dapat menjadi permasalahan jika kuantitas penduduk yang besar tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Permasalahan kependudukan pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan berantai disektor lainnya, seperti pada sektor ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

4.1.4. Proporsi Pejabat Struktural

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa kesenjangan gender pada proporsi pejabat struktural dilingkungan Dinas Pendidikan di Provinsi Bali masih cukup tajam. Kesenjangan gender terjadi pada semua eselon dan hampir semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Dari sembilan kabupaten/kota yang ada, hanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali jabatan eselon II dipegang oleh pejabat perempuan, selebihnya semua dipegang oleh laki-laki. Dari 53 jabatan eselon III yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten/kota terdapat 7 orang pejabat perempuan masing-masing Dinas Pendidikan dan Olah Raya di Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, dan Buleleng. Posisi perempuan dalam pengisian jabatan mulai tampak cukup signifikan pada jabatan eselon IV walaupun masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan posisi laki-laki. Dari 166 jabatan eselon IV yang ada, terdapat 43 orang pejabat perempuan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih

rinci mengenai perimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pengisian jabatan eselon, berikut ini dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Propo	KABUPATEN/KOTA	ESELON II			ESELON III			ESELON III		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	BULELENG	1	0	1	4	1	5	11	4	15
2	JEMBRANA	1	0	1	4	1	5	8	2	10
3	TABANAN	1	0	1	7	0	7	17	1	18
4	BADUNG	1	0	1	4	1	5	8	7	15
5	GIANYAR	1	0	1	5	0	5	9	6	15
6	KLUNGKUNG	1	0	1	6	0	6	21	3	24
7	BANGLI	1	0	1	4	1	5	15	4	19
8	KARANGASEM	0	1	1	5	1	6	13	5	18
9	KOTA DENPASAR	1	0	1	3	0	3	8	6	14
10	DIKNAS PROV BALI	0	1	1	4	2	6	13	5	18
	JUMLAH	8	2	10	46	7	53	123	43	166

Sumber Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2008

4.2. Karakteristik Agama Hindu

Kata *Hindu* sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Persia yang mengadakan komunikasi dengan penduduk di lembah Sungai Sindhu. Ketika mengadakan kontak dengan masyarakat di lembah Sungai Sindhu, orang-orang Yunani mengucapkan Hidnu dengan *Indoi*. Selanjutnya, orang-orang Barat yang datang kemudian menyebutnya dengan . Pada mulanya wilayah membentang dari lembah Sungai Shindu sampai yang kiri bernama Srilangka, Pakistan, Bangladesh, dan bahkan Bhatara, disebut dengan *Jambhudvipa*. Nama asli dari agama ini adalah *Sanata Dharma* atau *Vaidia Dharma*.

4.3. Hubunagn Agama dan Budaya dalam Hindu Bali

Kata *sinergi* (*synergy*) dalam *The New Lexicon Webster International Dictionary of The English Languuage* (1976), dinyatakan sebagai '*cooperation, working together, combined action, the cooperative action of two or more parts or organs of the body; the cooperative interaction of different drugs*'. Artinya, 'kerja sama, bekerja sama, menyatukan kekuatan, dua atau lebih bagian dari tubuh yang berkekuatan, bekerja sama; interaksi obat-obatan yang berbeda dalam satu kekuatan'. Berdasarkan uraian sebelumnya, pengaruh agama Hindu atau sinerginya terhadap kebudayaan Bali sangat dominan dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Bali mendapat pengaruh dari agama Hindu (yang mengantarkan memasuki masa sejarah) kiranya dapat dilihat kerangka unsur-unsur kebudayaan, seperti yang diajukan oleh Kluckhohn dalam karangannya, *Universal Categories of Culture* (1953), seperti yang disetujui oleh Koentjaraningrat (1980), yaitu: (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) oganisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup danteknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi, dan (7) sistem kesenian.

Pengaruh agama Hindu terhadap tujuh unsur kebudayaan Bali dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Bahasa.** Seperti telah disebutkan di atas, agama Hindu masuk ke Bali pada mulanya melalui media bahasa pemerintahan Sanskerta kemudian sejak Mahendradattagunapriyadharmapatni (permaisuri raja Dharmodayana Varmadeva), bahasa Jawa Kuno (Kawi) menggantikan media berbagai susastra Hindu dan hal ini tampak pengaruhnya terhadap bahasa Bali dewasa ini. Dalam *mantra struti* masih digunakan bahasa Sanskerta.
2. **Sistem pengetahuan.** Melalui media bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno, masyarakat Bali memiliki berbagai sistem pengetahuan yang bersumber dari agama Hindu dan budaya India, antara lain sistem pengobatan (*usadha*), pembangunan rumah (*hastakosala kosali* dan *hasta bhumi*).
3. **Organisasi sosial.** Pada prasasti-prasasti Bali Kuno sebelumnya disebut adanya sistem pemerintahan serta adanya lembaga kerajaan yang disebut *panglapuan, paramaksa, samohanda*, dan *senapati di panglapuan*. Sejak 1001 Masehi, lembaga tersebut dinamakan *pakira-kira i jero makabehan* yang anggotanya terdiri dari *parasenapati* (panglima perang) dan para *pandita* Siva dan Budha (Ardana, 1982). Demikian pula sistem pemerintahan di pedesaan seperti adanya *karaman, thani*, dan dalam perkembangan selanjutnya di Bali dikenal adanya tipe desa kuno dengan sistem pemerintahan *mauluapad* dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau *parapunggawa*.
4. **Sistem peralatan hidup.** Di samping sistem dan peralatan hidup yang merupakan produk asli Bali, sejak Zaman Prasejarah masyarakat Bali sudah pula memakai peralatan yang berasal dari luar, misalnya dapat dilihat dari tinggalan gerabah Arikamedu dari India Selatan yang rupanya sudah berlangsung sejak awal abad Masehi.
5. **Sistem mata pencaharian.** Sejak masa Prasejarah hingga dewasa ini rupanya pertanian yang kemudian berkembang dalam arti luas, termasuk perkebunan, (walaupun merupakan hal yang sangat universal), dipengaruhi agama Hindu. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa semua sistem pencaharian itu dikaitkan dengan agama Hindu. Artinya, upaya memenuhi kebutuhan hidup senantiasa dikaitkan dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Hal ini tampak hingga dewasa ini bahwa sistem pengairan yang sangat terkenal, yakni *Subak*, selalu dikaitkan dengan agama Hindu, misalnya di setiap mata air dan di tempat pembagian air dibangun pura Ulunsui, Bedugul, dan sebagainya.
6. **Sistem religi.** Ketika agama Hindu masuk di Bali, masyarakat Bali saat itu telah menganut kepercayaan kepada roh suci leluhur, adanya penguasa alam, dan gunung-gunung yang dianggap suci Agama Hindu yang memiliki keyakinan (*sraddha*) yang sama dengan kepercayaan setempat, yakni *Pitrapuja* (pemujaan kepada roh suci leluhur), mudah saja diterima oleh masyarakat Bali saat itu. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Kedatangan agama Hindu di Bali tidak mengubah kepercayaan setempat, tetapi agama Hindu memberikan pencerahan yang dapat lebih mengembangkan kepercayaan setempat.
7. **Sistem kesenian.** Sistem ini (kesenian Bali), walaupun tidak bisa dirunut asalny secara pasti, memiliki kemiripan dengan kesenian yang ada di India Selatan. Adanya pertunjukan wayang (yang oleh Brandes disebut sebagai kesenian asli Indonesia), mirip dengan pertunjukan sejenis di India Selatan yang disebut *kathakali* dipentaskan baik malam maupun siang hari (seperti *wayang lemah*). Demikian pula

pementasan cerita Ramayana dan Bhimakumara, seperti disebutkan dalam prasasti Jaha di Jawa Tengah yang bersumber kepada Ramayana dan Mahabharata yang di India disebut *Ramalila* dan *Mahabharatalila* atau *Krishnalila*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa masuknya agama Hindu di Bali tidak merusak atau melenyapkan kepercayaan atau kebudayaan lokal. Bahkan dalam hal tertentu, agama Hindu yang dari luar itu sangat menghargai kepercayaan dan tradisi budaya lokal masyarakat Bali.

4.4. Konteks Agama dan Budaya Bali

Apa yang saat ini dianggap dan dipahami sebagai nilai-nilai keagamaan Hindu di Bali, atau Hindu Dharma Bali, sesungguhnya adalah nilai-nilai kebudayaan Nusantara. Di Bali dikenal istilah *Tri Hita Karana*. Pelaksanaan *Tri Hita Karana* sudah populer sejak zaman dahulu, bukan saja di Bali, tetapi juga di seluruh kepulauan Nusantara-atau yang sebelumnya juga disebut *Dvipantara* artinya Kepulauan di antara anak Benua Jambu Dvipa', yang sekarang disebut India, dan *Astraalaya*, yang sekarang disebut Australia.

Peradaban-peradaban ini disebut "Peradaban Sindhu" atau Indus Valley kebu Civilization. Pengaruhnya sampai di kawasan yang disebut Aryan atau apa yang sekarang disebut Iran hingga *Astraalaya*'Australia'.

Adat-istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjelma menjadi budaya perekat bagi seluruh wilayah ini jauh lebih tua daripada agama mana pun didunia. Agama-agama lahir atau setidaknya selalu bersentuhan dengan budaya luhur ini. Budaya luhur inilah peradaban Sindhu dan inilah sesungguhnya budaya Nusantara.

4.5. Perkembangan dan Perubahan Budaya di Bali

Tantangan era globalisasi yang dihadapi masyarakat dan kebudayaan Bali sepertidikemukakan oleh Ardika (2005), dengan mengutip Appadurai, dicirikan oleh perpindahan orang (*ethnoscape*), pengaruh teknologi (*technoscape*), pengaruh media informasi (*mediascape*), aliran uang dari negara kaya ke negara miskin (*financescape*), dan pengaruh ideologi seperti HAM dan demokrasi (*ideoscape*) tidak dapat dihindari oleh kebudayaan Bali. Sentuhan budaya global ini menyebabkan terjadinyaketidakseimbangan atau kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Konflik muncul di mana-mana, kepatuhan hukum semakin menurun, kesantunan sosial diabaikan. Masyarakat cenderung bersifat sekuler dan komersial. Uang dijadikan sebagai tolok ukur dalam kehidupan.

Dilihat dari perspektif agama Hindu, kondisi zaman dewasa ini telah dinujumkan dalam kitab-kitab *Purana* yang menyatakan bahwa sejak penobatan Prabhu Pariksit cucu Arjuna sebagai maharaja Hastina pada 18 Februari 3102 SM, umat manusia telah mulaimemasuki zaman Kaliyuga (*Gambirananda*, 1984). Kata *Kaliyuga* berarti 'zaman pertengahan' yang ditandai dengan memudanya kehidupan spiritual, karena dunia dibelenggu oleh kehidupan material. Orientasi manusia hanyalah pada kesenangan dan memuaskan nafsu indrawi (kama) dan bila hal ini terus dituruti, nafsu itu ibarat api yang disiram dengan minyak tanah atau bensin, tidak akan padam melainkan makin berkobar dan menghancurkan diri manusia.. Ciri zaman Kali (*Kaliyuga*) semakin nyata pada era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi, dimotori oleh perkembangan teknologi dengan

muatan filsafat Hedonisme yang hanya berorientasi pada material dan usaha untuk memperoleh kesenangan nafsu belaka. Dengan tidak mengecilkkan arti dampak positif globalisasi, dampak negatifnya tampaknya perlu lebih diwaspadai. Globalisasi menghapuskan batas-batas negara atau budaya suatu bangsa. Budaya Barat yang sekuler sangat mudah diserap oleh bangsa-bangsa Timur dan bila hal ini tidak terkendalikan tentu menghancurkan budaya atau peradaban bangsa-bangsa Timur. Di mana-mana tampaknya masyarakat mudah tersulut pada pertengkaran. Kitab Skanda Purana, XVII.1 menyebutkan pusat-pusat pertengkaran yang menghancurkan kehidupan manusia, yaitu kekuasaan (politik), minuman keras, perjudian, pelacuran, dan harta benda/kekayaan (Mani, 1989).

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi antarkebudayaan Bali dan budaya luar seperti India (Hindu), Cina, dan Barat, khususnya di bidang kesenian, telah menimbulkan kreativitas baru dalam seni rupa maupun seni pertunjukan. Tema-tema dalam seni lukis, seni rupa, dan seni pertunjukan banyak dipengaruhi oleh budaya India. Demikian pula, budaya Cina dan Barat/Eropa member nuansa baru pada produk seni di Bali. Proses akulturasi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan adaptif, khususnya dalam kesenian, sehingga tetap mampu bertahan dan tidak kehilangan jati diri (Mantra, 1996). Sebagaimana diketahui, di Bali terdapat kantong-kantong hunian masyarakat Islam seperti di Desa Pegayaman (Buleleng), Pamogan, Kepaon dan Serangan (Denpasar). Kelompok masyarakat muslim tersebut memiliki sejarah yang erat dengan raja-raja atau para penguasa Bali di masa lalu, sehingga mereka sering disebut dengan istilah *nyama selam* atau 'saudara Islam/muslim'. Selain masyarakat Islam, di Bali juga banyak bermukim komunitas Tionghoa, bahkan mereka telah menyatu dengan masyarakat dan kebudayaan Bali. Hubungan kebudayaan Bali dengan masyarakat dan budaya Tionghoa dapat dikatakan telah berlangsung lama. Berbagai komponen budaya Tionghoa telah menyatu atau diadopsi dalam kebudayaan Bali. Penyatuan dan adopsi tersebut tampak pada: pemanfaatan uang kepeng (uang Cina) sebagai alat transaksi dan kebutuhan upacara di Bali dan beberapa jenis kesenian (seni ukir dan tari/baris Cina) (Ardana 1983, Wirata 2000, Pringle, 2004).

Masyarakat Tionghoa telah lama tinggal dan hidup di Bali. Masyarakat Tionghoa di Bali, sebagaimana lazimnya komunitas Tionghoa di Indonesia tinggal di perkotaan dan pedesaan. Menurut Visanty (1975), orang Tionghoa di Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi, yaitu Fukien dan Kwangtung. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada empat bahasa Cina di Indonesia, yaitu Hokkien, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton. Perilaku masyarakat Tionghoa yang tinggal di perkotaan berbeda dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Etnis Tionghoa yang tinggal di perkotaan umumnya kurang bergaul dengan masyarakat lokal, sedang mereka yang tinggal di pedesaan telah berbaur menyatu dengan masyarakat Bali.

Selain mata uang kepeng, unsur budaya Cina juga berpengaruh dalam seni di Bali. Keberadaan tari baris Cina di Desa Samur, Denpasar dapat dikatakan sebagai satu-satunya seni tari dengan kostum yang unik, dan diduga kuat mendapat pengaruh budaya Cina di Bali (Ardana, 1983). Demikian pula halnya seni barong yang diduga mendapat pengaruh kesenian Cina. Pengaruh budaya Cina juga dapat dilihat dalam arsitektur dan seni ukir Bali. Bangunan dengan atap bertingkat yang lazim di Bali dikenal dengan nama *meru* diperkirakan mendapat pengaruh arsitektur Cina. Seni ukir dengan pola sulur atau (tumbuhan dengan batang yang merambat disebut *patra Cina* juga dianggap sebagai pengaruh budaya Cina

4.6. Pandangan Budaya Bali terhadap Perempuan

Masalah yang paling krusial dari perempuan adalah persoalan bagaimana mengangkat derajat/peran perempuan. Selama ini perempuan selalu diletakkan sebagai pihak lemah, sebagai warga kelas dua, tetapi kalau perempuan tenis memikirkan itu kemudian berontak, dan terus berusaha mendapatkan tempat, akhirnya perempuan Bali akan kehabisan tenaga untuk memperjuangkan hal tersebut. Penulis justru menganjurkan kepada perempuan Bali agar berhenti menyebut diri kelas dua, kelas pinggiran Perempuan hendaknya berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan pandangan bahwa perempuan tidak seperti yang mereka duga. Kalau kaum perempuan Bali sudah memperlihatkan diri dalam pendidikan, dalam peranan di ilmiah tangga, maupun dalam aktivitas di masyarakat, secara otomatis para laki-laki tidak akan berpikir "dia itu seorang perempuan", tetapi lelaki akan berpikir "dia itu orang yang mampu".

Masyarakat Bali tidak pernah menempatkan perempuan sebagai perempuan lemah. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anak laki-lakinya, "Tolong bantu adikmu yang perempuan yang lebih lemah darimu". Justru masyarakat Bali mendidik anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, secara sama. Orang tua lebih menekankan pendidikan di rumah pada anak perempuannya karena ia akan meninggalkan keluarganya mengikuti keluarga suami. Anak perempuan diberikan pendidikan lebih keras dengan harapan ia akan membawa nama keluarga. Jangan sampai memalukan keluarga. Jangan sampai kehadirannya dicemoohkan, dikatakan dari keluarga yang biasanya hanya menadahkan tangan saja, tidak bisa bekerja membantu keluarga. Bisa dilihat dalam aktivitas sehari-hari di rumah, perempuan memasak, mengatur semua. Hanya dalam upacara besar, yang memasak bukan perempuan, melainkan laki-laki.

Perempuan menjalankan kodratnya, perempuan tentu akan hamil. Kalau ingin melahirkan anak-anak yang berkualitas, perempuan-perempuan itu mesti bisa merencanakannya. Kalau menginginkan anak yang sehat, berapa jumlahnya, perempuan harus merencanakan bersama suaminya. Kemudian, dalam perencanaan itu mempersiapkan diri karena selama bayi dalam kandungan, seorang ibu sudah mulai menanamkan dasar kepribadian untuk anaknya. Dalam hal ini, perempuan maupun laki-laki dapat mempersiapkan diri dalam keadaan tenang. Mereka tidak boleh membawa *karma* masa lampaunya, sehingga di dalam melahirkan anak, tidak lagi berada dalam keadaan tegang, cemas, ataupun bingung. Setelah merasa diri benar-benar siap, barulah perempuan mewujudkannya secara sadar bersama suaminya.

Masyarakat Hindu di Bali memandang perempuan bukan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi. Perempuan dianggap mempunyai kekuatan yang sangat besar yang dapat menciptakan keindahan, tetapi dapat pula "membahayakan" kehidupan di dunia ini. Untuk mereka yang ingin melepaskan diri dari keduniawian, seperti tercantum dalam *Sarasamuchaya*, "Hendaknya menghindari dan bahkan kalau mungkin dalam kenangan pun menghapuskan bayangan perempuan". Teks ini menggambarkan demikian takutnya laki-laki pada kekuatan magis perempuan yang dianggap dapat meluluhkan keteguhan iman dan memperlemah semangat juangnya untuk bertapa dan menyatukan dengan Tuhan.

Sejak kecil orang tua menanamkan pendidikan kepada anaknya bahwa seorang anak harus menghormati orang tuanya, orang yang lebih tua, orang lain dan makhluk lainnya di dunia, berbakti pada leluhur, serta menyembah Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa beserta manifestasinya. Rasa hormat adalah dasar untuk mencapai hubungan baik

dengan sesama, leluhur, dan Tuhan sebagai Maha Pencipta. Dengan adanya hubungan baik, akan tercapai keharmonisan dan keseimbangan antara *buana alit*, *buana agung*, dan *Hyang Wasa* yang akan membuahkan kebahagiaan lahir dan batin padadiri manusia.

Tidak banyak orang luar Bali yang mengetahui bahwa di beberapa tempat di Bali ada yang mempunyai kebiasaan "beda", yakni seorang suami memasak makanan untukkeluarganya setelah selesai bekerja di sawah, sedangkan istrinya berjualan di pasarsampai sore hari. Ini merupakan bentuk pembagian kerja (*division of labour*) yang bertitik tolak dari situasi. Jika orang luar-termasuk para pengamat dan peneliti sejak awal di kepalanya sudah terpola dengan konsep umum pembagian kerja secara seksual (*sexual division of labour*) Beneria, 1979; Budiman, 1981), apa yang bisa dikatakan mereka tentang realitas "lain" ini. Di sini terbukti bahwa tidak selamanya pandangan mengenai kultur patriarki dapat tepat digeneralisasikan untuk dikenakan kepada setiap etnis atau kelompok komunitas.

Untuk melaksanakan ajaran agama Hindu, biasanya perempuan sibuk menyiapkan dan membuat sesajen untuk dipersembahkan kepada para Dewa dan Sang Hyang Widi Wasa, di samping kewajibannya sehari-hari seperti tersebut di atas. Apabila upacara agama yang dilaksanakan itu upacara besar yang melibatkan keluarga besar atau masyarakat di sekitarnya, tugas perempuan hanya membuat sesajen (banten), sedangkan yang mengatur jalannya upacara, mempersiapkan upacara, bahkan memasak serta menyajikan makanan adalah laki-laki. Yang terlibat di sini tidak hanya suami-istri, tetapi juga anak-anak yang sudah akil balig.

Keluarga mendambakan adanya anak laki-laki karena anak laki-laki dianggap dapat meneruskan keturunan (*purusa*), membantu orang tua waktu usianya lanjut, dan membantu membukakan pintu ke sorga bila orangtua telah meninggal. Kalau sudah menikah, anak perempuan akan mengikuti suaminya. Keadaan ini menyebabkan orangtua lebih meletakkan harapan sepenuhnya pada anak laki-lakinya. Belakangan ini keluarga Hindu Bali membeikan kesempatan yang sama pada anak-anak perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan formal karena mereka tidak lagi mempunyai pandangan seperti zaman dahulu bahwa merasa rugi memberi pendidikan formal yang tinggi kepada anak gadisnya karena toh akan menjadi milik keluarga suaminya. Dengan pendidikan informal yang diterima di rumah, orang tua lebih menekankan anak perempuannya tinggal di rumah untuk membantu orang tua menyelesaikan urusan rumah tangga, tidak boleh bebas keluar rumah di luar jam-jam sekolah seperti anak laki-laki. Akan tetapi, orangtua Bali tidak pernah menanamkan konsep perempuan sebagai kaum lemah yang mempunyai kemampuan kurang dibandingkan dengan laki-laki. Para orangtua akan mengajarkan nilai bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda, tetapi mempunyai kemampuan yang sama.

Orang tua menanamkan kepada anaknya rasa pengabdian pada keluarga dan adanya hukum karma yang dapat mengenai semua orang. Kalau anak gadis telah menikah, apa pun yang terjadi harus diterima dengan lapang dada sebagai suatu karma.

Keluarga adalah di atas segalanya, sehingga kebutuhan anak harus lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perceraian, misalnya, merupakan tindakan yang menjatuhkan martabat keluarga asal gadis tersebut.

Sejak kecil ditanamkan pada diri anak-anak agar menjunjung tinggi harga diri dan martabat keluarga dengan mengharuskan anak gadisnya bekerja agar nanti kalau sudah

menikah tidak memalukan nama baik keluarga. Kalau anak perempuan menikah demikian orangtua mendidiknya-jangan menjadi orang yang hanya menerima uang belanja dan suami untuk menghidupi keluarganya, ia harus ikut aktif membantu suami menambah keuangan keluarga; juga ditanamkan sebuah konsep kerja bahwa semua pekerjaan itu mulia asalkan tidak menyalahi norma-norma masyarakat. Pekerjaan yang dilakukannya hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dasar inilah yang mendorong perempuan Bali bekerja, yaitu karena harga diri sebagai perempuan yang tidak mau hanya mengandalkan jerih payah suami serta sebagai istri merasa berkewajiban menambah keuangan keluarga, sedangkan sebagian kecil memberi alasan demi karier untuk mengisi waktu, dan agar bebas dari lingkungan keluarga. Jadi, mereka para perempuan Bali itu bekerja keras bukan karena dipaksa oleh suaminya atau keluarga.

Dengan demikian, dari keluarganya yang beragama Hindu anak perempuan Bali sudah mendapat pengajaran tentang: pentingnya menjunjung tinggi harga diri dan martabat keluarga, kesediaan mengabdikan pada keluarga, kesadaran akan adanya hukum karma, dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai tugas dalam hidupnya. Pendidikan di Bali tidak menekankan bahwa perempuan adalah kaum lemah. Dalam perspektif kultural Bali, perempuan harus hidup dengan harga diri sesuai dengan emansipasi perempuan, tanpa melupakan segi-segi estetika dan tanggung jawab pada keluarga. Tidak ditanamkan pada diri anak bahwa laki-laki adalah kompetitor (pesaing) dalam hidup. Anak-anak membuktikan hal ini dari kehidupan orang tuanya yang harmonis, anak-anak akan menyaksikan setiap hari bahwa setiap orang berkewajiban mengemban tugasnya dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Inilah realitas berabad-abad pada masyarakat Bali.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kalau seorang istri bekerja, waktu untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya berkurang dan hal ini dapat menimbulkan banyak masalah dalam keluarga karena kelebihan beban pada perempuan. Namun, ada yang berpendapat bahwa kalau perempuan sudah bekerja di luar rumah, tugas laki-laki di rumah akan meningkat. Di beberapa tempat di Bali ada yang mempunyai kebiasaan bahwa seorang suami melakukan pekerjaan memasak makanan untuk keluarganya setelah selesai bekerja di sawah karena istrinya berjualan di pasar sampai sore hari. Di sini terjadi "pengalihan beban" pekerjaan rumah dari istri ke suami. Bagaimanakah kenyataan ini dipersepsi oleh orang luar Bali? Bagaimana pula realitas diberi makna (diinterpretasikan) oleh para pengamat asing?

Selama perempuan bekerja, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangganya adalah anggota keluarga lainnya yang sempat. Tampaknya keluarga inti sudah mulai gotong royong menyelesaikan kehidupan sehari-hari karena kesulitan mendapatkan atau mempunyai pembantu rumah tangga atau sanak keluarga lainnya. Tingginya biaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan memaksa banyak keluarga inti baru yang belum mapan dalam keuangan untuk belajar menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan pembantu. Ada sebagian perempuan yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan di rumahnya dan sebagian perempuan lainnya dibantu sepenuhnya oleh pembantu rumah tangga, ipar, mertua, orang tua, atau keluarga lainnya.

Urusan di luar keluarga, seperti urusan dengan banjar atau keluarga besar, semua dilaksanakan oleh laki-laki. Perempuan hanya menyampaikan pendapat dan pemikirannya melalui suami karena yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Pertemuan-

pertemuan di masyarakat hanya dihadiri oleh kepala rumah tangga. Dengan adanya program PKK, perempuan mulai dilibatkan dalam aktivitas di banjar, terutama dalam menerima pengetahuan-pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan pekerjaan untuk menyejahterakan keluarga.

Pandangan perempuan yang menganggap laki-laki sebagai partner atau mitra dalam kerja - dan bukan musuh atau pesaing dalam meniti karier-adalah modal besar untuk terciptanya ketenangan dalam pekerjaan. Kedudukan dalam kariernya tidak diperoleh perempuan karena iba belas kasihan, atau supaya dikatakan pemerintah Bali telah menjalankan emansipasi, tetapi memang karena perempuan itu mempunyai kemampuan untuk menempati pekerjaan itu. Dengan adanya pandangan ini, kiranya jelas bahwa pembangunan daerah Bali tidak didasarkan atas perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, pembangunan Bali digerakkan oleh lelaki dan perempuan sebagai mitra kerja yang sejajar. Kelihatannya ini seperti normatif ideal, tetapi sesungguhnya inilah realitas Bali itu!

Peran ganda pada perempuan Bali-Hindu telah tertanam sejak kanak-kanak. Polaasuh dan budaya masyarakat mengarahkan perempuan untuk berperan ganda dalam hidupnya. Perempuan Bali tidak merasakan peran ganda sebagai beban, tetapi sebagai suatu pengabdian untuk keluarganya sendiri di samping menjaga harga diri dan martabat keluarga asalnya. Perasaan ini dapat menjadi ketenangan dalam keluarganya sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi benturan antara suami dan istri dalam menjalankan tugas rumah tangganya. Ketenangan dalam keluarga akan menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Kondisi ini sangat membantu dalam melancarkan jalannya pembangunan di Bali.

Emansipasi akan dapat dinikmati oleh perempuan dalam segala lapisan apabila kebanyakan perempuan dapat mencapai pendidikan formal sama dengan laki-laki. Perjuangan perempuan dalam emansipasi bukan untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi ingin memperoleh kedudukan dan penghasilan atas dasar kemampuannya. Kiranya perjuangan emansipasi di Bali tidak meninggalkan tugas perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga. Di Bali, emansipasi berjalan secara pelan, tetapi pasti, tanpa disertai dengan benturan yang meresahkan masyarakat. Laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan dan kemampuan sama memperoleh penghasilan yang sama. Keadaan ini dapat terlihat pada tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, dan tenaga kepemimpinan. Namun mereka yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, tenaga produksi, tenaga usaha pertanian, dan buruh kasar lainnya, yang mengandalkan tenaga keterampilan mendapat penghasilan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Alasan yang diberikan oleh pengusaha atau yang menggajimereka adalah tenaga perempuan lebih lemah dari laki-laki.

Agar dapat berperan aktif dalam pembangunan sejajar dengan kaum laki-laki, perempuan Bali harus tetap mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan formal. Atau nonformal. Aktivitas perempuan Bali dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya saja, tetapi juga untuk menyejahterakan dirinya sendiri tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Bali. Dilihat dari Sensus Penduduk Bali Tahun 2000 dan survai peran ganda perempuan Bali Hindu di atas, dapat dikatakan bahwa peran perempuan Bali dalam pembangunan di daerahnya sangat besar. Tenaga kerja perempuan yang jumlahnya mencapai 43% dari jumlah tenaga kerja di Bali memberi sumbangan yang seimbang dengan tenaga kerja laki-laki dalam

pembangunan Bali. Tenaga kerja perempuan berperan di segala lapangan dan jenis pekerjaan sebagaimana kaum laki-laki. Tenaga kerja perempuan banyak terserap dalam sektor perdagangan, rumah makan, hotel. Namun, dalam sektor pekerjaan yang menuntut profesionalisme lebih tinggi, misalnya sebagai tenaga profesional, teknisi manajer, dan yang sejenis, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh lebih sedikitnya jumlah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan sampai di perguruan tinggi dibandingkan dengan yang dicapai laki-laki (perempuan 3% dan laki-laki 5%) atau memang perempuan kurang berminat mengambil posisi itu.

Emansipasi akan dapat dinikmati oleh perempuan dalam segala lapisan apabila jumlah perempuan yang dapat mencapai pendidikan formal sama dengan laki-laki. Keberhasilan perjuangan perempuan Bali tidak terjadi karena iba dan belas kasihan pihak lain, tetapi terjadi karena perempuan ingin memperoleh kedudukan dan penghasilan berdasarkan kemampuannya. Kiranya perjuangan emansipasi di Bali tidak meninggalkan tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Dalam keseharian perempuan Bali tampak tegar, seakan mengambil perannya melebihi peran yang seharusnya ia lakukan. Di rumah ia sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, dan kadang-kadang juga sebagai "bapak". Dengan demikian, anak-anak mereka melihat ibunya kaum perempuan adalah perempuan kuat, baik fisik maupun mental. Jarang anak-anak Bali melihat ibunya cengeng, menangisi nasibnya. Mereka lebih sering menyaksikan ibunya sehari-hari sebagai perempuan pekerja keras, perempuan kuat, tegar, karena menerima hidupnya sebagai suatu *karma* yang harus dijalani. Dalam kondisi ketiadaan pilihan kecuali menerima karma tersebut, perempuan Bali berusaha berbuat sesuatu untuk dapat memperbaiki karma berikutnya untuk dirinya dan keluarganya.

Bagi perempuan yang sudah menikah, seluruh hidupnya diperuntukkan bagi keluarganya, yakni anak-anak dan suaminya, sedangkan perempuan yang belum menikah akan memberikan hidupnya untuk keluarga, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Karena hidupnya adalah untuk keluarga, ia akan berjuang untuk keluarganya; dengan atau tanpa diminta suami, istri akan membantu suami menghidupi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak memiliki keahlian apa-apa, disamping mengerjakan pekerjaan domestik, yakni mengurus urusan rumah tangga, ia juga membantu pekerjaan suaminya. Kalau mempunyai keahlian tertentu, ia akan menggunakan keahliannya ini untuk mendapatkan uang. Kerja baginya adalah mempertahankan harga diri dan martabat keluarga asal tempat dia dilahirkan Perempuan Bali bukan orang yang pemalas yang hanya mampu menengadahkan tangan, mengatur apa yang diberikan suami. Perempuan Bali adalah perempuan kreatif yang mampu mengusahakan sesuatu untuk bersama-sama membangun rumah tangga. Keadaan ini sering membuat laki-laki menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah kalau perempuan mandiri dalam segala hal.

Banyak orang tua di Bali memberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah buat anaknya apakah laki-laki atau perempuan. Persaingan hebat terjadi antara lelaki perempuan dalam mencapai prestasi sekolah. Bintang-bintang kelas lebih banyak disandang oleh perempuan. Cara belajar perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar, sehingga wajar ia mencapai prestasi lebih tinggi daripada laki-laki. Aktivitas perempuan dalam organisasi dan masyarakat agak kurang, sehingga kesempatan perempuan untuk mengembangkan daya nalarnya kurang dibandingkan

laki-laki. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin-apakah pemimpin dalam rumah tangga atau di pekejaa diperlukankemampuan lain yang hanya mungkin diperoleh dari pengalaman bermasyarakat. Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik di Bali sebenarnya sudah tampak jelas sejak zaman kerajaan-kerajaan Bali Kuno. Banyak tokoh perempuan yang tercantum prasasti-prasasti, baik sebagai ratu maupun sebagai pendamping raja. Hal ini tentu tidak lepas pengaruh agama Hindu yang tidak mentabukan perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Hal ini tampak pula pada saat pemerintah kolonial Belanda mengadakan intervensi ke Bali dan mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Bali, yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda. Pada saat itu juga tampil tokoh-tokoh perempuan yang ikut berperang melawan pemerintah kolonial Belanda. Perempuan bukan spesialis penjaga dapur. Pada saatnya, ketika negara membutuhkannya, dengan semangat menunaikan dharma, perempuan Bali akan turun gelanggang-bersama mitra sejawatnya, kaum lelaki.

4.7. Penyajian Data

Bagian ini berisi tanggapan masyarakat tentang peran perempuan di ranah publik. Pada penelitian ini peneliti mengambil informan sebagai narasumber dari berbagai strata masyarakat dan jenis pekerjaan yang berbeda. Jumlah narasumber semuanya adalah 128 orang.

Tanggapan tersebut diformulasikan dalam bagian ini dengan struktur berikut: (1) lebih dahulu disajikan pertanyaan lengkap yang disampaikan kepada para informan, lalu (2) ditampilkan transkripsi tanggapan/jawaban informan atas pertanyaan tersebut. Jawaban atau tanggapan informan dideskripsikan sealamiah mungkin secara apa adanya. Informan memiliki jawaban yang seragam atau sebanyak 100% mereka menjawab "mengikuti dan patuh pada ajaran agama Hindu". Secara umum, tanggapanmya diringkassebagai berikut.

Nilai ajaran adat Bali, dimana penelii terlahir sebagai perempuan Bali dan orang tua penelii mendidik penelii sebagai orang Bali, sehingga penelii diharapkan menjadi perempuan Bali yang mengikuti ajaran adat Bali tersebut.

Sebagai perempuan Bali, penelii harus dekat dengan lingkungan, masyarakat sekitar terutama basic religion masyarakat Bali yang umumnya Hindu, maka untuk setiap kegiatan upacara harus dilakukan gotong-royong

(Jawaban kuisisioner: Ni Luh Putu Parmini, instruktur Organisasi Meditasi Suryani, Denpasar).

Dari tanggapan narasumber tersebut terlihat bahwa perempuan Bali memiliki ketaatan dan kepatuhan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu dan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka.

Perempuan Bali tampaknya memahami betul tentang ajaran budaya mereka. Hal itu tampak pada jawaban mereka, sebagai berikut:

Ajaran adat Bali tersebut seperti contohnya *Ngayahang Banjar*. Adat Bali ini bisa dilakukan perempuan/lelaki Bali dengan tujuan menjalin hubungan sosial antara masyarakat. Bisa dikatakan gotong royong saling bantu-membantu. Sehingga muncullah rasa timbal balik atau dalam ajaran Hindu adalah *Tat Twan Asi* (kamu adalah aku, aku adalah kamu).

Menyama Braya adalah warisan turun-temurun para leluhur masyarakat Bali di mana segala kegiatan, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan, dimulai dari persiapan, prosesi, penutupan upacara dilakukan oleh perempuan Bali secara gotong-royong. Jadi, mutlak diperlukan budaya *Menyama Braya*, konsep kebersamaan dan persaudaraan

(Jawaban kuisioner: Mirah Adi, pengusaha perempuan Penebel, Tabanan).

Dan jawaban tersebut tampak bahwa mereka lebih menekankan pada pentingnya hubungan harmonis dengan masyarakat dengan semangat kegotongroyongan.

Dari jawaban mereka, tampak bahwa mereka memahami secara mendalam tentang ajaran agama dan budaya mereka, terutama ajaran tentang kemasyarakatan. Berikut ini jawabannya:

Karena dengan mematuhi ajaran budaya *Ngayahang Banjar*, selain kita dapat menjalin hubungan sosial, kita dapat secara tidak langsung masih bisa menjaga keajaiban budaya Bali. Bisa kita lihat jarang sekali ada kegiatan adat seperti ini/langka dan unik. Sehingga peneliti sekali bila adat ini dilupakan.

Tanpa budaya ini rasanya tidak mungkin dilakukan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan di Bali yang selalu melibatkan banyak orang dan memerlukan pengorbanan baik moral atau material. Tanpa adanya persaudaraan yang kuat, akan sangat sulit dilaksanakan. Ini juga mengingatkan bahwa semua kegiatan itu adalah tanpa pamrih

Jawaban kuisioner: Ni Putu Purbayanthi, Manager Civil Project, Badung).

Untuk mengerti apakah pemahaman itu hanya pada kognitif ataukah sampai afeksi dan konasi. Mereka melaksanakan ajaran budaya itu sudah sesuai dengan hati nurani. Hal itu terlihat pada pernyataan berikut ini;

Sesuai dengan hati nurani. Namun masih ada kendala karena peneliti perempuan pekerja swasta yang tidak bisa full 100% menghadiri *Ngayahang Banjar*, paling tidak 1-2 hari peneliti masih bisa izin dari tempat kerja. Mungkin di era mendatang pihak Banjar hendaknya lebih luwes di dalam menyikapi hal ini, karena akan banyak karyawan atau orang yang bekerja. Mungkin bisa dengan cara sebagian *banten* kita beli, sebagian kita kerjakan bersama.

Budaya ini sangat-sangat kami perlukan dan dengan perasaan saling memerlukan kami melakukan dengan hati kami yang paling dalam dengan segala kesadaran kami.

(Jawaban kuisisioner: I Gusti Agung Putri Dwipa Natarani Lestari., SayPerpustakaan di Bali International School, Sanur).

Melalui ajaran itu, mereka mengakui tidak bisa sepenuhnya melaksanakan aktivitas adat (bagi perempuan pekerja). Ke depan, mereka berharap adat bisa bersikap lebih luwes.

Untuk mengerti secara mendalam apakah ajaran itu berpihak pada perempuan atau sebaliknya. Mereka umumnya tidak merasa terkungkung oleh dominasi kaum lelaki.

Peneliti kira ini tergantung dari sikap masing-masing suami. Pada peneliti, peneliti tidak merasa terkungkung dengan suami peneliti. Hal positif bagi peneliti, peneliti diperbolehkan bergaul dengan masyarakat Banjar oleh suami peneliti. Sehingga peneliti mengetahui karakter dan *background* mereka, maka muncul rasa saling menghormati di antarmasyarakat Banjar, tidak sombong, tidak mencemooh, berusaha agar diterima di hati masyarakat Banjar.

Kami sadar, walau kamu harus berinteraksi dengan banyak kaum lelaki, kami punya norma agama yang sangat kuat. Sehingga, pada umumnya para suami tidak akan merasa keberatan atau curiga. Jadi, tidak ada alasan bagi kaum lelaki mengekang perempuan

(Jawaban kuesioner: Ni Wayan Warniti, karyawan asal Desa Mengesta, Tabanan).

Dari jawaban informan/responden, terlihat bahwa mereka dapat menerima ajaran budaya mereka dan mereka mematuhi sebagai kewajiban.

Di zaman modern ini ajaran budaya itu dipandang masih relevan dilaksanakan dan bermanfaat untuk menciptakan tertib kemasyarakatan.

Iya, sangat relevan dilaksanakan karena tujuannya adalah menjaga adatbudaya Bali agar tidak punah. Tujuan lainnya adalah kita sebagai perempuan Bali agar dapat menempatkan diri dalam bergaul dengan masyarakat banjar, saling menghormati, tidak meremehkan banjar. Secara global tujuannya adalah agar perempuan Bali bersifat fleksibel, bisa bergaul di segala tempat, tidak memandang level, kaya miskin. Kita semua sama, saling membutuhkan. Dalam istilah Bali *apang bise sarag sorog, 'saling mengisi'*.

Mengingat masyarakat Bali mayoritas Hindu, dalam pelaksanaan upacara-upacara perempuan Bali akan selalu memakai budaya ini dan akan relevan sepanjang jaman

(Jawaban kuisisioner: I Wayan Sukarsa, Bendesa Ada, Br. Baturning, Badung).

Sekarang ini gerakan kaum feminisme semakin gencar menyuarakan kesetaraangender, dan tampaknya informan sangat mendukung dengan gerakan ini, sepertipada jawaban berikut ini;

Setuju sekali. Dengan adanya kesetaraan gender, perempuan lebih luaswawasannya tidak hanya berkuat pada kegiatan rumah tangga walau perempuan tidak bisa terlepas dari itu. Tetapi perempuan mempunyai kelebihan, punya hak untuk berkarir, mampu mengurus anak dan suami. Serta perempuan sangat berperan dalam mendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memang cukup berat. Tapi berbahagialah perempuan. Hanya perempuan yang punya kelebihan itu.

Setuju, dengan catatan dalam hal sosial masyarakat kita harus setaranamun ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dilakukan lelaki walau kadang perempuan juga mampu melakukannya

(Jawaban kuisisioner: Anak Agung Sri, wartawati koran "Wanita Tokoh", Denpasar).

Dari jawaban mereka tampak bahwa perempuan Bali siap bekerja lebih keras lagi di ranah publik. Meskipun demikian, mereka tidak akan menninggalkan ranah domestik mereka, sebagaimana diajarkan oleh agama/budaya mereka. Adapun kesetaraan gender itu konkretnya seperti jawaban berikut ini

- a. Perempuan diberi hak untuk perluasan pergaulan dan karier.
- b. Tidak selalu bergantung pada lelaki jika bepergian, tanpa harus menunggu suami pulang kerja.
- c. Seorang pemimpin tidak harus seorang lelaki, di jaman modern ini banyak sekali perempuan menjadi pemimpin.
- d. Status sosial masyarakat harus sama atau setara.
- e. Demokrasi dalam keluarga.
- f. Hak dan kewajiban harus sama.

(Jawaban kuisisioner: I Gede Gunawan tokoh masyarakat Tabanan).

Tampaknya mereka sudah memahami wacana kesetaraan dan makna demokratis. Mereka menghendaki kesetaraan gender dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud.

Agar ada keseimbangan antara pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama dengan perubahan budaya, dalam hal tuntutan gender yang dapat dilaksanakan oleh perempuan Bali dan apa saja yang tidak boleh dilaksanakan, menurut informan sebagai berikut;

Dalam kesetaraan gender ini perempuan Bali bisa seperti lelaki. Tidak ada larangan. Peneliti kira di zaman sekarang hampir semua perempuan melakukan pekerjaan seperti lelaki asal sesuai dengan norma, pihak lelaki masihlah pihak membantu sedikit-sedikit. Walau di zaman modern ini perempuan disetarakan, hendaknya perempuan menghormati hak-hak lelaki, tidak meremehkan lelaki karena paling tidak energi perempuan tidak sekuat energi lelaki. Sejelek-jeleknya lelaki, kita tetap harus

menghormati mereka karena suatu saat yang sulit kita masih tetap minta pertolongan mereka.

Untuk kesetaraan di dalam keluarga kecil, mutlak harus dilaksanakan. Untuk hal-hal bersifat sakral (religius) tidak boleh dilaksanakan

(Jawaban kuisioner: Ida Bagus Gde Dharmayuda, Badung).

Kesetaraan gender tidak mutlak dapat dilaksanakan. Dalam hal tertentu secara kodrati memang ada perbedaan, berikut jawaban mereka

Perempuan setara dengan lelaki. Dalam hal pekerjaan masih bisa disetarakan. Tetapi dalam hal memiliki keturunan, perempuan tidak bisa tanpa bantuan lelaki. Jadi, tidak mungkin perempuan setara dengan pria.

Untuk membangun keluarga yang harmonis, sangat diperlukan kesetaraan suami dan istri dalam segala hal, sehingga tidak terjadi intimidasi dalam keluarga. Untuk hal-hal sakral religius kita tidak bisa melanggar ketentuan ajaran agama karena tujuan utamanya adalah satu, yaitu mencapai kebahagiaan bersama

(Jawaban kuisioner: I Ketut Susila, Kepala Desa Mambal, Badung)

Jelaslah, perempuan Bali belum berani berbenturan dengan ajaran budaya mereka. Meskipun pada umumnya mereka menuntut kesamaan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, mereka lebih memilih bersikap kompromistik dan menyeimbangkan antar perubahan budaya dengan ajaran budaya mereka.

4.8. Pembahasan

4.8.1. Perempuan Bali dalam Perspektif Gender

Sesuai dengan rancangan penelitian ini dan berdasarkan teori yang digunakan, secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi, sebagai berikut:

1. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminim
2. Konstruksi sosial dari peran citra baku (*stereotype*)
3. Konstruksi agama dari keyakinan, kitab suci agama, dan adat-istiadat, dalam hal ini agama, keyakinan, dan adat-istiadat masyarakat di Bali.

Dalam memahami konsep gender, beberapa hal perlu dipahami, sebagai berikut.

(1) Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur, yang menempatkan perempuan maupun laki-laki sebagai korban dari sistem tersebut. (2) Berbagai perbedaan peran dan kehidupan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung berupa dampak perlakuan atau sikap, maupun yang tidak langsung berupa dampak implementasi undang-undang atau kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma, atau pun dalam berbagai struktur yang ada di masyarakat. (3) Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang

ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregatif dalam berbagai bidang kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, ketidakadilan gender berdampak pula terhadap laki-laki.

Tampak jelas bahwa masyarakat Bali, khususnya kaum perempuan, menginginkan kesetaraan gender dalam pengertian yang amat bijaksana. Mereka memahami perbedaan itu pasti ada, tetapi yang lebih mereka permasalahkan adalah pembagian peran, tugas, dan fungsi.

Kenyataan di lapangan selama ini beranggapan bahwa gender pada masyarakat Bali tidak perlu dipermasalahkan. Pada dasarnya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada umumnya dan masyarakat adat sudah adil dan setara, dalam arti tidak ada masalah.

Dinamika kehidupan masyarakat Kota Denpasar dewasa ini diwarnai oleh semakin berkembangnya perempuan Bali perkotaan yang menjalankan peran di sektor publik. Perkembangan peran ini telah memunculkan konflik peran, yaitu peran domestik dan peran publik. Dari penelitian ini diketahui bahwa peran publik yang dijalankan kaum perempuan perkotaan Bali di Denpasar belum mengurangi peran domestiknya. Justru keterlibatan mereka menjalankan peran publik demi memperoleh statusnya sebagai perempuan Bali yang masih peduli menjalankan peran domestiknya dan masih memiliki komitmen dalam menjalankan peran adatnya. Budaya patriarki belum sepenuhnya memberikan kebebasan kaum perempuan dalam mengembangkan dirinya. Hal ini terbukti dari kenyataan ketika diadakan *paruman* di desa adat hanya kaum laki-laki yang boleh mengeluarkan pendapatnya. Jadi, amat jelas bahwa Teori Keseimbangan (*Equilibrium*) sangat tepat digunakan sebagai acuan dalam pengarusutamaan gender.

4.8.2. Perempuan Bali dalam Budayanya

Permasalahan yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan agama dan adat budaya yang, tampaknya, bagi orang Bali tidak dapat dipisahkan. Menurut Winasa, menghadapi tantangan ke depan yang disebut sebagai era globalisasi atau kesejagatan setiap negara, bahkan setiap daerah, harus sudah menyiapkan langkah-langkah strategis di dalam menjaga keberadaan atau kadaulatan dirinya. Berbicara tentang keberadaan dan kedaulatan, Bali sebagai sebuah bangunan peradaban harus sudah menyiapkan dirinya, sehingga senantiasa mampu menjaga eksistensi serta kesejagatan dirinya sebagai sebuah bangunan peradaban.

Tiga simpul utama yang harus senantiasa dijaga dan dibangun secara harmonis untuk menjaga dinamika Bali di tengah arus deras perubahan adalah wilayah agama, wilayah adat, dan wilayah kebudayaan.

Wilayah agama, dalam hal ini agama Hindu, haruslah senantiasa menjadi spirit utama setiap perilaku pembangunan di Bali. Dengan demikian, sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan juga evaluasi serta pertanggungjawabannya haruslah berada pada satu tarikan nafas yang sama. Artinya, setiap perilaku pembangunan di Bali haruslah dilandasi oleh ajaran-ajaran agama, sebagai dasar filosofinya. Dengan demikian, terjadi keseimbangan perilaku antara perilaku dalam dimensi *dharma* agama dan dimensi *dharma* negara, Tanpa menjaga harmonisasi antara perilaku *dharma* agama dan *dharma* negara, apa yang dilakukan di dalam sebuah proses besar peradaban yang bernama pembangunan itu akan menjadi kering

serta jauh dari nilai-nilai kesejatan. Tegasnya, perilaku pembangunan baik dari dimensi pemerintahan maupun publik atau masyarakat, tanpa dilandasi oleh nilai-nilai kesejatan (agama), akan menjadi kering dan dangkal secara nilai maknawi.

Dalam wilayah adat dan budaya, di Bali keberadaan adat haruslah dijaga di dalam perilaku keberadaban. Adat haruslah menjadi wadah bagi setiap interaksi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai keadaban. Apakah itu nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, atau gotong royong, dan juga nilai-nilai yang bersifat universal, seperti keberagaman atau pluralisme, demokratisasi, hingga penghargaan atas hak asasi manusia (HAM). Tentu saja, di sini semuanya harus diterjemahkan sesuai dengan kearifan-kearifan lokal khas Bali.

Potensi adat dan budaya Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu cukup beragam. Ketika menghadapi dan menjawab tantangan global sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam keadaban adat dan budaya di Bali sangat siap. Sekarang tergantung pada masyarakat Bali itu sendiri, bagaimana harus mengoptimalkan potensi adat dan budaya itu di dalam aktualisasinya, sehingga dimensi-dimensi kekinian juga kelak dapat terjawab oleh perilaku adat dan budaya di Bali. Dengan demikian, kesenjangan kultural tidak sampai terjadi menimpa masyarakat Bali.

Kemurnian ajaran adat dan budaya di Bali juga harus bersentuhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya teknologi informasi yang pada tataran globalisasi mengalami percepatan yang demikian pesat. Adalah keliru bila memosisikan adat dan budaya jauh dari perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap dinamika yang terjadi haruslah disikapi atau mendapatkan penyikapan-penyikapan secara arif, baik dari sisi adat maupun budaya. Tanpa penyikapan-penyikapan yang kritis terhadap dinamika yang ada, adat akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda kita.

Agama, adat, dan budaya adalah bagian dari perilaku yang tidak terpisahkan untuk menuju harmonisasi peran bagi setiap komponen, baik dari sisi *dharma* agama maupun *dharma* negara. Bagaimana sebetulnya karakteristik perempuan Hindu dan bentuk daya kreativitasnya? Perempuan Hindu tidak identik dengan kesenian dan keterampilan membuat sesajian banten saja.

Perempuan Bali dalam perannya, baik sebagai istri, ibu, dan bagian dari komunitas adat, memiliki identitasnya tersendiri. Karakteristik khas perempuan Bali membuat mereka mudah dikenali sebagai orang yang ulet, giat bekerja, tidak membeda-bedakan pekerjaan, serta selalu siap bekerja membantu suami untuk menopang kehidupan rumah tangga.

Kendati ada yang sukses, perempuan Bali tetap bersikap merendah dengan mengakui peranannya hanya sebagai sekadar penambah penghasilan suami. Di Bali, kaum perempuan mengambil pekerjaan kaum lelaki. Dulu memang sempat perempuan Bali digambarkan sering *ngerumpi* melalui aktivitas *makutu* (mencari kutu) di rumah tetangga. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sekarang gambaran semacam ini tidak tampak lagi.

Dalam hubungannya dengan tatanan sosial kemasyarakatan, perempuan Bali selalu taat merealisasikannya. Perempuan Bali sangat menghormati kesepakatan sosial yang terbangun selama ini. Dalam kaitannya dengan kerja adat, misalnya, perempuan Bali dengan ikhlas terlibat di dalamnya.

Dalam seluruh kegiatannya, perilaku perempuan Bali mencerminkan konsep *Tri Kaya Parisudha*. Selain pikirannya cantik, perkataan dan perbuatannya juga mesti cantik. Dalam

konteks berpikir (*manacika*), perempuan Bali dapat menghargai pendapat orang lain dan selalu berpikiran positif memandang segala sesuatu (*positive thinking*). Dalam lingkungan keluarga perempuan Bali mampu menghargai pendapat suami dan anak-anak. Selain itu, mereka bersedia menerima nasihat-nasihat suami. “Kami tidak mengklaim bahwa pendapat sendirilah yang paling baik, tanpa mau mendengarkan pikiran orang lain,” demikian pendapat mereka (hasil wawancara).

Dalam konteks berkata (*wacika*), perempuan Bali berpegang pada *satya wecana*, sehingga mampu memfungsikan bibir untuk selalu berkata baik. Mereka menghindari mempergunjingkan kejelekan orang lain, mencaci maki, dan bahkan memfitnah. Dalam kaitan ini, perempuan Bali sudah mulai mampu menyuarakan kebenaran, memberdayakan dan memperjuangkan dirinya (perempuan) dalam berbagai kegiatan. Bila diberi kesempatan dan dihargai, sebetulnya perempuan Bali mampu bersuara dan suaranya pasti didengar.

Pada konteks berbuat (*kayika*), perempuan Bali mampu berbuat sesuai dengan ajaran agama. Kendati pengaruh global berhembus kencang, perempuan Bali tidak akan meninggalkan dan atau kehilangan jati diri. Selama ini, perempuan Bali dikenal sangat identik dengan keterampilannya membuat *banten* dan berkesenian. Predikat itu sampai tetap dipertahankan meskipun bersinggungan dengan pengaruh zaman. Dalam hal pengaruh budaya lain, perempuan Bali tidak harus menutup diri. Meskipun demikian, mereka harus mampu bertindak selektif: mana yang layak diadopsi untuk memperkaya wawasan diri dan mana pula yang harus di jauhi. Adapun filter paling ampuh dan telah teruji selama ini untuk menyaring pengaruh negatif budaya lain adalah nilai-nilai agama (Hindu).

Kreativitas perempuan Bali mesti disesuaikan dengan keperluan masyarakat. Perempuan Bali, dalam hal ini, tidak hanya mengembangkan daya kreativitas dalam membuat *banten*. Lebih dari itu, kreativitas mereka hendaknya juga dilibatkan dalam berbagai bidang lain, misalnya dalam organisasi kemasyarakatan. Kreativitas tersebut hendaknya juga terus diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasannya dalam menghadapi perubahan.

Karakteristik perempuan Bali tercermin dari kesederhanaan dan keterbukaannya. Perempuan Bali sederhana dalam beraktivitas dan mampu menerima penganuh global. Mereka bisa mempertahankan akar budayanya dan memegang teguh ajaran agama meskipun harus bergulat dengan penganuh global. Dalam konteks upacara, perempuan Bali dituntut mesti terampil membuat *banten* serta mampu mewacanakan nilai filosofis yang terkandung dalam *bebantenan* itu.

Di era global dan abad informasi ini perempuan Bali tetap eksis dengan jati dirinya tanpa tercabut dari akar budayanya. Mereka mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Perempuan Bali, sesuai dengan ajaran agama Hindu, menaati aturan tertentu. Dalam berbusana, misalnya, perempuan Bali tidak bisa sembarangan, apalagi untuk kegiatan yadnya. Mereka tidak boleh menggunakan pakaian tidak sopan untuk ke pura. Mereka harus menyanggul rambutnya, berkebaya, serta memakai kain. Dari sini dapat dilihat bahwa karakteristik perempuan Bali sudah langsung terkenal mulai dari fisiknya.

Memang sifat kedaerahan karakteristik semacam ini sangat kental. Cara berpakaian perempuan Bali untuk ke pura sifatnya umum. Dalam ajaran Hindu tata cara berpakaian perempuan Bali dalam memasuki sebuah tempat suci diatur. Misalnya, rambut harus diikat atau disanggul, Penataan rambut ini memiliki makna simbolik filosofis spiritual. Rambut

diikat agar tidak jatuh di dalam areal tempat suci. Rambut yang jatuh bukan soal sepele, merupakan gangguan dalam ber-*samadhi* dan ber-*yoga* karena dianggap sebagai simbol kematian.

Karakteristik lain yang dapat menunjukkan seseorang sebagai perempuan Bali adalah cara hidup perempuan tersebut. Dalam hal ini, cara hidup orang Hindu Bali sangat berbeda dengan pola hidup dari perempuan agama lain. Perempuan Bali diharuskan dapat melakukan kegiatan yang ritual seperti *mabanten* tiap hari bukan tiap minggu atau tiap bulan. Ciri ini pula yang bisa membedakan keberadaan perempuan Bali di masyarakat. Dengan adanya pola seperti itu, perempuan Bali harus mampu dan kreatif membuat sarana yang dipakai untuk upacara tersebut. Setidaknya membuat canang: membuat *banten* merupakan karakteristik utama perempuan Hindu Bali. Tiap perempuan Bali secara umum mampu membuat *banten*, setidaknya yang berskala kecil. Untuk sarana upacara yang besar, memang tidak semua perempuan Bali mampu melakukannya.

Bagi perempuan Bali, terlibat intens dalam proses pendidikan anak-anaknya menjadi karakteristik tersendiri. Mereka tidak pernah secara khusus mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar membuat *banten* atau sarana upacara lainnya. Namun, pola perilaku dan pola kerja keseharian perempuan Bali memberikan teladan dan sekaligus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk ikut belajar dan berlatih. Alam kultural, dalam hal ini, berkembang menjadi guru. Kelak dalam waktu tertentu, anak akan mampu membuat sarana upacara tanpa harus belajar secara khusus.

Daya kreativitas perempuan Bali dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman ajaran agama Hindu dalam hidupnya. Mereka tidak lagi harus terpaku pada istilah *mula keto*. Adanya ceramah atau *dharma tula* merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tatwa, filsafat, dan etika. Demikian pula semakin maraknya kegiatan *pesantian* saat ini di masyarakat juga merupakan bentuk kreativitas perempuan Bali.

Dikaitkan dengan *Tri Kaya Parisudha*, perempuan Bali harus bersikap, berbicara, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dalam bersikap seorang perempuan Bali yang baru bertemu dengan teman atau siapa saja harus mampu mengucapkan salam Hindu "*Om Swastiastu*". Perilaku-perilaku lainnya dari perempuan Bali harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Hindu. Dalam *Yajurveda* XIX.94, misalnya, disebutkan bahwa istri hendaknya taat melaksanakan upacara keagamaan. Demikian pula dalam *Atharvaveda* XIV.2.20, disebutkan bahwa seorang istri seharusnya melaksanakan kebaktian, memuja Saraswati, dan menghormati orangtua dan keluarga.

Perempuan Bali juga harus mampu memosisikan diri sebagai yadjanama dalam rumah tangga. Hal ini telah banyak diuraikan dalam *Manusmerti* IX.28, yang menyebutkan bahwa "Keturunan, terselenggaranya upacara-upacara keagamaan, pelayanan yang setia, hubungan sanggama yang tertinggi dan mencapai pahala di sorga dan nenek moyangnya ... semua bergantung pada istri". Demikianlah sesungguhnya perempuan bukan hanya sekadar pelahir keturunan, lebih dari itu juga penyelenggara upacara keagamaan rumah tangga. Di Bali, perempuan pulalah yang memiliki peran sentral dalam menyiapkan *sesajen* pada hari raya Galungan, Kuningan, dan hari-hari Hindu lainnya. Arti dan peran perempuan Bali dalam aktivitas ritual agama, dengan demikian, sangat diperhitungkan.

Perempuan Bali adalah pekerja yang ulet, sebagai istri yang mengabdikan, dan sebagai penyelenggara rumah tangga yang tangkas dan cekatan. Perempuan memberikan semangat

dalam keharmonisan rumah tangga. Perempuan memprediksi pada masa depan: “perempuan Bali akan maju seiring dengan makin meningkatnya tantangan”. Kesan miring juga sering dilontarkan pihak luar tentang profesi perempuan Bali yang terjun dalam berbagai sektor lapangan kerja.

Pertanyaan “Benarkah perempuan Bali ditelantarkan oleh suami yang memiliki kebiasaan *matajen* (bertaruh menyabung ayam) sebagaimana sering dilekatkan lelaki Bali?” inilah yang seharusnya menjadi pelurusan wacana secara terus-menerus, agar masyarakat luar tidak menyalahpahami eksistensi perempuan Bali. Harus disosialisasikan entah dengan metode bagaimana bahwa perempuan Bali bukan sebagai ibu rumah tangga belaka. Orang luar harus tahu bahwa perempuan Bali menjalani kehidupannya dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, baik ketika menjalankan perannya sebagai ibu, istri, maupun sebagai pencari nafkah tambahan.

Budaya kerja perempuan Bali menunjukkan bahwa mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Perempuan Bali tidak mau bersantai sementara suami membanting tulang mencari nafkah. Hal ini dilhami filosofi hidup terhadap *yadnya* yang diyakini. Perempuan Bali akan tetap mempertahankan ciri khas keperempuanannya. Kondisi ini dimungkinkan mengingat perempuan Bali tidak dianggap kaum marginal oleh laki-laki dan keluarga. Menurut Weda, perempuan sangat dimuliakan dan menjadi perlambang sebagai Dewi Saraswati, Dewi Uma, Dewi Laksmi, Dewi Pertiwi, dan sebagainya.

4.8.3. Perempuan Bali dan Perubahan Budaya

Ajaran agama Hindu telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terciptanya kesetaraan gender antara perempuan dan lelaki. Konsepsi kesetaraan tersurat dalam ajaran Weda. Meskipun masih berupa dasar-dasar ajaran etika seperti ajaran *silā krama*, *tata susila* dan *tri hita karana*, hal ini dapat mematahkan mitos klasik bahwa perempuan itu manusia warga kelas dua. Ajaran-ajaran itu selanjutnya melahirkan beragam ajaran sesama seperti *wiku sesana*, *rsi sesana*, *werti sesana*, *aji sesana*, *stri sesana*, serta *putra sesana*. Ajaran *sesana-sesana* ini mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Hindu, sehingga tercipta gerak kehidupan yang harmonis dan selaras di dalam kegiatan bermasyarakat. Jika merujuk pada Weda, tidak ada yang namanya “dominasi” dan “subordinasi” gender. Tak ada doktrin bahwa hakikat serta martabat lelaki lebih tinggi daripada hakikat serta martabat perempuan.

Wacana tuntutan kesetaraan gender antara perempuan dan lelaki, katanya, makin lantang diteriakkan para perempuan di belahan dunia manapun. Tuntutan tentang kesetaraan gender ini sangat manusiawi, bahkan mulia. Belakangan ini kaum perempuan sudah berani bersuara lantang dan tergerak hatinya untuk mengetahui jati dirinya serta mengetahui secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban seorang perempuan.

Tuntutan kesetaraan gender di anggap sebagai sebuah kritik dan rem untuk kaum lelaki supaya tidak memperlakukan perempuan semena-mena. Prinsip kesetaraan dan keharmonisan antara kaum perempuan dan lelaki harus dilandasi dengan suara hati nurani berbudi luhur sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Konsep kesetaraan gender dalam perspektif Hindu di jelaskan dalam ajaran *Maya Tattwa*. Dalam ajaran Itu diungkapkan Sang Hyang Widhi bermanifestasi menjadi dua kekuatan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya, yakni kekuatan *cetana* (kesadaran)

disebut kekuatan *purusa* (maskulin). Kekuatan yang lainnya adalah *acetana* (ketidaksadaran) yang disebut kekuatan *prakerthi* atau *predhana* (feminin). Kedua kekuatan itu memiliki proporsi serta fungsi masing-masing.

Kekuatan *purusa* menciptakan parama siwa tattwa, sadha siwa tattwa, siwa tattwa sampai terciptanya kekuatan *panca dewata*. Kekuatan *predhana* menciptakan kekuatan *mahat, budhi, ahamkara, triguna, panca tan matra* sampai adanya kekuatan *panca maha butha*. Ajaran *Maya Tattwa* menegaskan bahwa sebelum manusia tercipta, kesetaraan gender antara unsur keperempuanan dan unsur kelaki- lakian telah diciptakan. Namun demikian, kedua kekuatan memiliki proporsi dan fungsi masing-masing serta berjalan sinergis, komplementatif, dan saling bergantung seolah olah terciptanya suatu sistem sebagai ekosistem.

Keseimbangan ekosistem inilah yang menjadi hukum *Rta*, seperti yang diungkapkan dalam Weda. Hukum *Rta* ini disebut *dharma*, Semua makhluk di alam semesta ini telah diikat oleh *dharma*-nya Sang Hyang Widhi. Oleh karena itu, tidak ada satu makhluk pun bisa lepas dari ikatan *dharma*, sehingga lahirlah apa yang disebut *swadharna*. Dengan *swadharna*, kehidupan makhluk di alam semesta ini dapat ini dapat mencerminkan aktivitas yang dinamis, seimbang, selaras, dan serasi. Kalau *swadharna* ini diubah oleh manusia sendiri hanya karena alasan demi mengejar kemajuan zaman dan teknologi-itu sama dengan mengubah kesadaran, merusak keseimbangan, dan memporakporandakan keserasian alam terhadap isinya. Perubahan kesadaran bisa jadi memicu lahirnya suasana disharmonis dan akan berimplikasi negatif terhadap akhlak, moral, budi, dan perilaku manusia, sehingga kehancuran tidak terhindarkan. Inilah yang disebut *kali yuga* itu.

Adat Bali meliputi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat pada umumnya yang sangat dikenal dengan sistem kekerabatan patrilinealnya. Sistem kekerabatan patrilineal sering diduga keras memberi peluang suburnya budaya patriarki (kekuasaan / dominasi laki-laki). Dengan budaya patriarki, apakah ada ketidakadilan gender dalam adat Bali? Di mana letak ketidakadilan itu? Bagaimana pula cara mengatasinya? Pada pemikiran perempuan Bali-yang hidup dalam lingkungan adat sejak kecil sampai dewasa-tentu telah terbangun konstruksi sosial yang kebetulan hidup dalam suasana harmonis, tidak pernah merasakan tekanan dan konflik, apalagi merasa menjadi korban ketidakadilan gender.

Menurut Berger (1990), eksternalisasi merupakan keharusan antropologis. Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Keberadaan manusia terus-menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas. Kebudayaan sebagai produk manusia yang sudah menjadi objektif pada akhirnya mengkondisikan manusia, baik secara individu maupun sosial, untuk menyesuaikan diri dengan produknya, baik bahasa, teknologi, atau lembaga sosialnya,

Struktur budaya hukum dalam masyarakat, yang terdiri atas ide / nilai, norma, lembaga, peran, dan perilaku. Struktur ini bersifat hierarkis dan saling mempengaruhi.

Hukum adat Bali, pada umumnya dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, harus bersatu dan bekerja sama dengan erat sebagai *dwitunggal*. Ke-*dwitunggal*-an lelaki dan perempuan hendaknya berkiblat pada para dewa

dengan pasangan idealnya: Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Durga, serta-tentu saja-Dewa Kama dan Dewi Ratih.

Tentang kedudukan perempuan, *Kitab Suci Manawa Dharmacastra* Bab III sloka 58 dan 59 menggambarkan seperti berikut:

"Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib"

Oleh karena itu, orang yang ingin sejahtera harus selalu menghormati perempuan. Kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan.

Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (*Manawa Darmacastra* IX, 96) sebagai berikut:

"Untuk menjadi ibu, perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan yang ditetapkan dalam Weda harus dilakukan oleh suami dan istrinya
Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama"

"Manu Smerti mengumpamakan perempuan seperti bumi, pertiwi, dan tanah, sedang laki-laki adalah benih atau bibit. Bumi dan bibit kedudukan dan peran yang sama, saling melengkapi dan membutuhkan dalam menciptakan kehidupan.

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat dilihat dalam *Kitab Bhagawadgita* Bab I sloka 41,42 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Bila tirai kebatilan merajalela, oh Kresna, perempuan menjadi jalang, maka moral serta warna (dalam masyarakat) akan campur aduk, "

" Keruntuhan moral perempuan akan membawa keruntuhan keluarga serta arwah nenek moyang akan jatuh keneraka, dan segala sesajen air, makanan yang dipersembahkan tidak berguna baginya".

Tanggung jawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan akhlak masyarakat. Perempuan memegang sentral dalam kehidupan dan

kebahagiaan keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara, tentang semangat kerja keras, *Bhagawandgita* Sloka III.5 dan 8 menyebutkan sebagai berikut:

"Tidak seorang pun tidak bekerja walaupun untuk sesaat saja karena dengan tiada berdayanya manusia dibuat bertindak oleh hukum alam".

"Bekerjalah seperti yang telah ditentukan sebab bekerja jauh lebih baik dari tidak bekerja. Kalau kau tidak bekerja hidup sehari-hari pun tidak mungkin".

Dalam Kitab *Sarasamuscaya* etos kerja terlihat pada penekanan adanya *karmaphala*, yaitu hasil dari perbuatan-perbuatan baik pada masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Setiap *karma* (perbuatan) pasti membuahkan hasil, baik atau buruk bergantung pada *karma*-nya. Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Spirit ini kemudian dituangkan dalam bentuk hukum adat, khususnya dalam hukum kekeluargaan desa adat di Bali. Hukum keluarga menganut sistem kekeluargaan garis keturunan *purusa* yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki karena ahli waris-berdasarkan makna harfiahnya-berarti juga bisa perempuan, khususnya bila dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Bila dalam keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, otomatis anak laki-lakilah sebagai ahli waris.

Di sinilah letak perbedaan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pada umumnya menurut hukum waris Bali ada tiga macam ahli waris: (a) *Pratisentana purusa* (anak laki-laki); (b) *Sentana Rajeg* (anak perempuan yang berstatus sebagai anak lelaki); (c) *Sentana peperasan* (anak angkat). Terlihat di sini-dan harus di akui-bahwa hukum waris ini mengandung muatan *bias* gender.

Bagi masyarakat Bali, tidak mudah menjawab pertanyaan "Mengapa perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak diperhitungkan? Mengapa hak waris perempuan (di) hilang (kan)? Beranikah masyarakat Bali dengan jujur dan realitis mengakui bahwa dalam soal warisan telah terjadi ketidakadilan gender? Ini bukan soal Kecil. Ini merupakan tantangan adat. Dalam konteks keagamaan, ini soal serius dan sensitif-amat sensitif, bahkan! Jika hingga saat ini perempuan Bali tampak *enjoy* tidak memasalahkan ketidakadilan hukum waris ini, sampai kapankah kepasrahan perempuan Bali terus bergantung dan menutup diri?

Sejalan dengan pendapat Berger, bagaimana hubungan gender dirumuskan dalam Kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit budaya Bali? Bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam budaya dan menghasilkan system kewarisan menurut *garis purusa* yang ternyata sesungguhnya tidak identik dengan garis lurus laki-laki? (Karena perempuan pun bisa menjadi *sentana rajeg* sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga.) Tetapi, Bila Keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki, hanya anak laki-laki yang menjadi waris. Walaupun memang pahit, harus diakui-sekali lagi- bahwa di sini dalam hukum adat Bali ada *bias* gender.

Bagi anak perempuan, apalagi sudah kawin keluar rumah, ia tidak berhak mewarisi harta keluarga dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga pihak suami selama perkawinannya langgeng. Bila terjadi perceraian, anak perempuan tersebut

kembali ke keluarga asalnya dan beralih menjadi tanggung jawab orangtua atau saudara laki-lakinya. Hak asuh anak-anak jatuh pada suami / keluarga suami; bagi si ibu, tidak ada tanggung jawab ekonomis atau pun spiritual terhadap anak-anaknya. Aturan ini jelas menugikan perempuan yang memilih bercerai. Aturan ini juga amat merugikan perkembangan fisik dan psikis anak yang karena adat, harus (di) pisah (kan) dari ibunya.

Sekali lagi, beranikah masyarakat Bali mengakui lagi bahwa aturan adatnya sangat *bias* gender?

Menurut hukum adat dalam budaya Bali mengenai harta perkawinan, harta bersama (guna kaya), yang diperoleh selama masa perkawinan, akan dibagi dua (50% hak perempuan) dan bila ada harta *tatadan* (bekal atau hibah dari orangtua perempuan), harta *tatadan* sepenuhnya kembali menjadi hak perempuan. Pada kenyataannya, dalam kasus perceraian yang banyak diselesaikan hanya secara adat, perempuan Bali sering tidak menggugat hak harta bersamanya, apalagi bila ada anak-anak, biasanya diberikan kepada anak-anaknya. Meskipun ini hak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan Bali tidak menuntutnya. Apakah ia telah terhegemoni oleh dominasi patriarki dalam selubung halus "harta yang diberikan anak-anaknya"? Perempuan Bali sendirilah yang wajib menjawabnya.

Observasi penulisan di lapangan sering menemukan fakta menyedihkan: anak perempuan yang bercerai dan pulang ke rumah orangtuanya selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan-bila memungkinkan-juga sering membantu biaya sekolah anak-anaknya. Menurut hukum adat, orangtua atau saudara laki-laki di rumah asalnya wajib bertanggung jawab bila ia sakit ataupun meninggal. Bila tidak mau, mereka akan dikecam oleh masyarakat adatnya. Oleh karena itu, setiap perkara yang terjadi harus dilaporkan kepada *kelian* atau kepala banjar adat, baik di lingkungan rumah suami maupun di tempat asal istri. Nasib istri yang dicerai tidak boleh mengambang tak karuan. Kepala banjar pun terflibet karena ini menentukan kewajiban banjar adat bila kelak anggota masyarakatnya meninggal atau memiliki masalah hukum lainnya.

Pada kondisi di atas terlihat bahwa posisi perempuan memang serba salah dan sangat dirasakan keadaan *bias* gender dan ini melahirkan ketidakadilan gender. Hukum adat Bali tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat agraris, demikian juga lembaga-lembaga adat, seperti desa adat, sangat bergantung pada tanah (wilayah kerjanya) dan peran-peran individu, sesuai dengan kondisi saat itu. Dari sisi kekuasaan dalam masyarakat, pemegang dominasi adalah para tuan tanah. Dengan demikian, sistem yang berjaya pada masyarakat Bali adalah feodalisme.

Tabel 4.2 Peran Perempuan di Bali

No	Uraian	Perempuan	Laki-laki
1	Sumbangan terhadap ekonomi keluarga	46,5%	53,5%
2	Sumbangan curah tenaga untuk keluarga : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk ekonomi menengah kebawah • Untuk ekonomi kelas tinggi 	65% 49%	35% 51%
3	Pengambilan keputusan dalam keluarga	44%	56%

(Putra Astiti dan Tim 1995. *Peranan Perempuan dalam Pembangunan*. Hasil Penelitian Universitas Udayana bekerja sama dengan Bappeda Tk. I Bali.)

Hasil penelitian Astiti (1995) menunjukkan bahwa: (1) peran perempuan hampir sama dengan laki-laki; (2) anggapan bahwa perempuan Bali tidak berani protes adalah salah sebab terbukti dalam pengambilan keputusan pada keluarga keterlibatan anak lelaki dan perempuan hampir seimbang-setidaknya tidak ada "pembungkaman" hak bicara anak perempuan.

Ada yang harus di telusuri lebih jauh, sumber *bias* gender ada pada warisan. Apa makna warisan menurut hukum adat Bali? Konsep warisan dalam hukum adat Bali memiliki beda makna dengan warisan dalam pengertian hukum Barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat material atau memiliki nilai uang. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban yang selalu bersifat material sekaligus immaterial.

Gugatan ketidakadilan gender biasanya terjadi bila ada kekayaan yang berlebih. Di sini anak perempuan baru merasakan ketidakadilan. Sebenarnya hukum adat juga tidak melarang orangtua memberi hibah berupa tanah untuk anak perempuannya yang kawin. Inilah yang disebut dengan *harta tatadan*; tentu wewenang sepenuhnya pada orang tua. Hukum adat Bali memberi peluang bagi orang tua yang bijaksana bila ingin memberi harta kekayaan pada anak gadisnya.

Karena adanya *bias*gender dalam hukum adat Bali, tetap ada upaya hukum bagi orang tua yang sensitif gender ingin membantu anak gadisnya walaupun sudah kawin ke luar. Inilah jawaban mengapa perempuan Bali pada umumnya tidak melakukan protes, tidak merasa menjadi korban dari hukum keluarga yang *bias* gender

Memang merupakan kenyataan bahwa pada masyarakat Bali terjadi *bias* gender dalam hukum adat. *Bias* itu terletak pada tatanan norma, sementara pada tatanan ide tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Dalam tatanan perilaku tidak muncul protes besar para perempuan. Ini mendorong penulis untuk mengasumsikan bahwa mereka *merasa* tidak di perlakukan tidak adil karena pengertian warisan di Bali lebih banyak bermuatan kewajiban daripada hak. Bahkan, diam-diam sebagai sesungguhnya dengan tidak menerima warisan, perempuan merasa beruntung sebab dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai individu yang bebas mengekspresikan diri, tidak terikat kewajiban keluarga dan tuntutan kewajiban banjar. Bagaimana dalam sistem kekerabatan patrilineal prioritas utama pasti pada anak laki-laki. Itu tidak bisa dipungkiri. Arogansi laki-laki-diakui atau disangkal-pasti ada dan sangat mungkin terjadi. Sistem ini dengan jelas telah memberikan dasar melahirkan kekuasaan pada laki-laki.

Menurut para penulis dalam buku *Menggugat Harmoni*, kenyataan ketidakadilan gender (kekerasan terhadap perempuan / istri, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT) ternyata tidak mutlak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan, pendidikan, atau pun tingkat kesejahteraan. Kekerasan terhadap istri / perempuan yang bisa terjadi dalam kalangan intelektual, buruh, tani, pengusaha, agamawan, dan lain-lain, baik di Eropa, Amerika, atau Asia-termasuk Indonesia. Budaya dan ideologi patriarki (dominasi kekuasaan laki-laki) masih sangat dominan. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah berakar dari "budaya dominasi laki-laki" atau "budaya patriaki".

Pertanyaan menariknya: bukankah adat budaya Bali termasuk budaya patriarki? Jika demikian, apakah dapat dikatakan bahwa budaya Bali telah memberikan kontribusi bagi terjadinya KDRT? Jika memang begitu, beranikah masyarakat Bali mengakui?

Perubahan budaya jelas tidak dimungkinkan karena sistem kekeluargaan patrilineal. Dengan di perkuat alasan agama dan budaya, sistem kekerabatan ini, diyakini mengandung kebaikan-kebaikan berikut.

1. Status anak menjadi jelas dan pasti, yaitu mengikuti garis keturunan *purusa* (ayah)
2. Tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak, pendidikan, kesehatan upacara, kawin, atau mati menjadi jelas dan definitif: ada pada pihak ayah.
3. Nilai anak sangat tinggi dan utama; kelahirannya diyakini sebagai reinkarnasi para leluhur keluarga *purusa*, dalam keadaan apa pun anak tak mungkin disia-siakan oleh keluarga *purusa*-nya. Ini tidak boleh diubah, karena menyangkut kewajiban suci (*darmaning sentana*).

Jadi, memang ada kepastian yang tegas tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Bila ini dilalaikan, semua warga dan kerabat pasti akan mengingatkan dan mengancam yang

bersangkutan. Ini-harus juga diakui-adalah benar: hukum waris budaya Bali sangat positif bagi perlindungan anak. Ketika di masyarakat lain terjadi penyalahgunaan anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya, di Bali tidak akan terjadi-setidaknya selama supremasi hukum adat ini ditegakkan.

4.9. Proses Pelaksanaan Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan seperti telah diuraikan di depan, mencakup tiga hal, yaitu (1) pengorganisasian, (2) interpretasi, dan (3) aplikasi. Sesuai dengan kebijakan yang dimaksud, yaitu pemberlakuan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional jelas hal ini menandakan bahwa pemberdayaan perempuan dan penganutamaan gender, khususnya kepada perempuan, telah menjadi isu dan perdebatan yang tetap aktual serta penting.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan di daerah Bali. Saat ini Perda mengenai Pemberdayaan Perempuan di Bali sedang direncanakan. Penelitian ini juga berguna untuk dapat membantu mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada masyarakat Bali-setidaknya pada tataran penyusunan program kebijakan.

Dari pantauan penulis, peraturan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut sudah selayaknya mempertimbangkan aspek budaya dan perubahan budaya di daerah setempat. Di samping itu, peraturan dan kebijakan ini perlu disosialisasikan lebih luas dan intensif demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Umumnya masyarakat dan perempuan Bali belum menyadari pemberlakuan kebijakan pemerintah ini. Dengan kata lain, tugas, fungsi dan peran lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan belum dikenal masyarakat meskipun keberadaan sudah diketahui.

4.10. Pemberdayaan Perempuan Bali

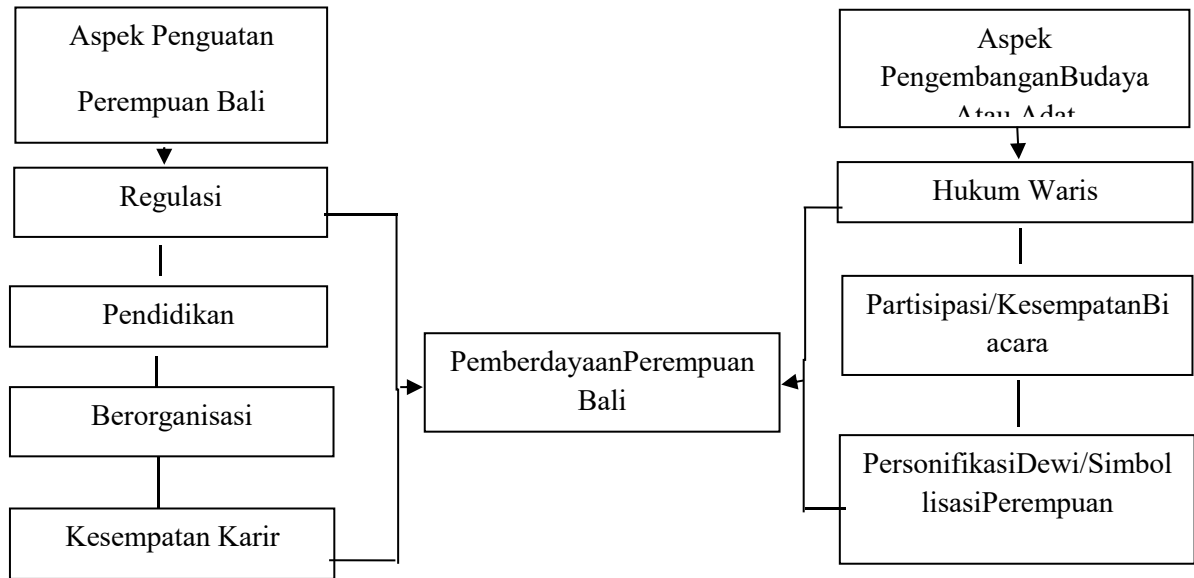
Dari paparan di atas terlihat bahwa telah terjadi perubahan persepsi dan konsep diri (*self concept*) pada perempuan Bali. Namun, mereka tidak melakukan gerakan secara ekspresif dan atraktif. Perubahan budaya dan sikap perempuan terjadi secara evolusioner-moderat-dan bukan revolusioner radikal-yang adaptif terhadap penganut global. Perubahan itu tidak mengubah sistem budaya yang mereka pegang dan perubahan itu terjadi pada sisi perilaku mereka dengan pergerakan secara alamiah.

Bagi perempuan Bali, gerakan feminisme yang dilakukan secara terbuka dianggap tabu dan bertentangan dengan ajaran agama, budaya, dan adat. Mereka lebih memilih pergeseran peran perempuan secara diam-diam, namun berdaya dan semakin kuat di

ranah publik tanpa merusak sistem yang dianut bersama dan pada akhirnya perubahan itu bisa diakui dan diterima oleh masyarakat. Perempuan Bali menyadari bahwa budaya patriarki dalam budaya Bali muncul pada tingkat perilaku. Mereka menyadari tentang keterbatasan peran mereka.

Dengan demikian model pemberdayaan perempuan Bali disusun sebagai berikut:

Gambar 4.1. Model Pemberdayaan Perempuan Bali



4.10.1. Aspek Penguatan Perempuan Bali

4.10.1.1. Regulasi

Yang dimaksud dengan regulasi dalam penelitian ini adalah Inpres No 9/2000. Keberadaan kebijakan pemerintah ini bertujuan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan: analisis gender dan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dalam kaitan dengan perempuan Bali, aspek regulasi yang diharapkan adalah regulasi yang disesuaikan dengan budaya Bali agar pemberdayaan dan pengarusutamaan gender terlaksana dengan baik.

4.10.1.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan individu karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula kualitas SDM-nya. Secara normatif, tampak bahwa kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, baik pendidikan dasar, Pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender. Namun, dalam realitasnya kesenjangan gender di Bali cukup tinggi,

terutama pada jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kondisi seperti ini perlu diatasi antara lain dengan melakukan sosialisasi gender di berbagai lapisan masyarakat, sehingga nilai-nilai sosial budaya yang bersifat merugikan atau kurang mendukung kemajuan perempuan yang bias diperbaiki. Data di bawah ini memperlihatkan bahwa kesenjangan di bidang pendidikan masih ada.

(Perthatikan Tabel 4.3)

Tabel 4.3 Persentase Pendidikan Tertinggi Penduduk 10 Tahun Ke Atas di Provinsi Bali Menurut Daerah dan Jenis Kelamin 2004

NO	Ijasah yang dimiliki	2004					
		Kota			Desa		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tidak Tamat SD	14.67	16.94	15.75	22.87	26.65	24.59
2	SD	22.92	29.53	26.08	36.79	42.53	39.39
3	SLTP	16.8	17.93	17.34	14.78	14.27	14.55
4	SMU	28.18	23.49	26.47	17.22	10.46	14.15
5	SMK	6.01	5.06	5.56	4.38	3.36	3.91
6	D1/D2	2.75	1.59	2.2	1.3	1.17	1.24
7	D3/Sarjana Muda	1.98	1.36	1.7	0.55	0.55	0.55
8	D4/S1/S2/S3	5.67	4.06	4.9	2.11	1.02	1.61
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Bali, 2004

Setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan akan dapat mencapai hasil yang maksimal apabila dalam pelaksanaannya yang didukung oleh semua pihak demikian halnya dengan upaya pengarusutamaan gender di bidang pendidikan Sosialisasi gender dikembangkan tidak hanya dalam tataran formal, kantor atau sekolah namun bias dikembangkan dalam pendidikan di keluarga dan masyarakat luas.

4.10.1.3. Organisasi

Pendidikan modern yang diintroduksi oleh pemerintah kolonial Belanda di Bali membuka mata masyarakat, termasuk kaum perempuan, untuk melakukan perlawanan kepada penjajah melalui cara yang lebih baik, misalnya dengan membentuk organisasi modern. Organisasi Putri Bali Sadar (PBS), misalnya, menjadi wahana modern pertama bagi kaum perempuan Bali untuk memperjuangkan nasib kaumnya dengan memperluas pendidikan dan memperjuangkan nilai-nilai baru dalam kesusilaan, perikemanusiaan menuju pada usaha meninggikan derajat kaum perempuan.

Aktivitas kaum perempuan Bali dalam bidang politik terus tampak pada masa perjuangan kemerdekaan. Mereka turut mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik hingga di zaman kemedekaan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi pada usaha yang sistematis untuk mendelegitimasi Partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Dengan menggunakan konsep kodrat, pemerintah Orde Baru mengkonstruksi sebuah ide gender yang mendasarkan diri pada *Ibuisme*, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai hal yang tidak layak. Dalam usahanya memperkuat politik gender pemerintah Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi

perempuan untuk membantu pemerintah dalam menyebarluaskan ideologi gender seperti: *Dharma Perempuan*, *Dharma Pertiwi*, dan *Pembinaan Kesejahteraan Keluarga*. Ketiadaan organisasi yang independen bagi kaum perempuan yang mengakibatkan kaum perempuan mengalami nerempuan, khususnya di Bali berada dalam posisi tersubordinasi dan terpinggirkan dalam dunia politik selama rezim Orde Baru berkuasa.

Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, merupakan salah satu propinsi kebanggaan bangsa Indonesia. Masyarakatnya yang dikenal ramah dengan budayanya yang tinggi menjadikan Bali menjadi pusat tujuan turis mancanegara dan turis lokal. Membanggakan juga (bagi masyarakat Bali) sekaligus ironis (bagi bangsa Indonesia) bahwa Bali lebih dikenal dunia lingkungan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Bali menyimpan potensi wisata luar biasa yang dapat menyedot minat wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Sebagai Telah diketahui bersama, peristiwa Tragedi Bom Bali I dan II, yang cukup banyak menelan korban jiwa, telah membuat bangsa Indonesia, khususnya rakyat Bali, cukup menderita. Berkurang drastisnya jumlah turis yang datang di Bali tentu membawa dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat perajin dan pedagang kecil menengah. Meskipun demikian, dengan semangat dan kegigihan masyarakatnya, Bali dapat bertahan. Hal ini juga merupakan hasil kerja keras dari perempuan Bali melalui organisasi-organisasi wanitanya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah secara bahu-membahu dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang melayani kesejahteraan masyarakat.

Organisasi perempuan Bali saat ini-seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dapat menjadi asisten atau pembina bagi para perajin, khususnya perempuan perajin, terutama dalam memberikan akses kepada permodalan dan pemasarannya. Dengan demikian, mereka dapat berkembang lebih maju dan dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta inovasi anggotanya, dan meningkatkan kesejahteraannya, sehingga kelak dapat menjadi mitra pemerintah yang mandiri terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah yang akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi nasional.

Melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi perempuan, misalnya Dharma Wanita, dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Dekranasda dan PKK sudah mulai aktif kembali terutama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, revitalisasi Posyandu, dan program kesejahteraan keluarga. Demikian juga dengan kehadiran Dharma Wanita dengan program pendidikannya (pemberantasan buta aksara), semua anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi wanita atau pun secara individu telah membantu Pemerintah dengan program pemberdayaan masyarakat.

Karakter perempuan Bali yang *koh ngomong* kurang memiliki keberanian (malu - malu) dalam menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka mampu. Hal ini masih ditemukan pada perempuan Bali. Sifat tersebut merupakan tantangan yang sangat menantang ditunjukkan melayani LSM (lembaga social masyarakat) yang bergerak dalam pengorganisasian perempuan agar tujuan organisasi bisa tercapai.

4.10.1.4. Kesempatan Karier

Peluang kerja di luar pekerjaan domestik cukup banyak untuk perempuan di yarakat, apalagi setelah Bali dinyatakan sebagai daerah pariwisata. Kalau hanyasebatas menjadi pekerja, pendidikan sekolah yang meningkatkan pengetahuan perempuan sudah memadai. Tetapi, kalau ada keinginan untuk mendapatkan peluang lebih besar dan lebih tinggi, diperlukan kemampuan berorganisasi dan bersosialisasi. Kemampuan membaca peluang tidak hanya diperoleh dari ilmu pengetahuan, tetapi bisa juga dari kreativitas seseorang yang harus dilatih sejak dini.

Karier adalah keahlian yang diamalkan di masyarakat atau dijadikan sumber kehidupan. Umumnya karier bertujuan mendapatkan sejumlah uang sebagai pendukung diri

atau keluarganya, sebagai usaha seseorang mengembangkan dan memajukan dirinya dalam menjalani suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghargaan atau penghasilan. Jika demikian, sesungguhnya peluang perempuan untuk memasuki dan mengembangkan kariernya cukup lapang. Akan tetapi, banyak perempuan tidak menyadari bahwa apa pun yang dilakukan itu bisa dianggap dan dimasukkan sebagai karier sepanjang mereka mau berusaha meningkatkan kemampuannya, mempergunakan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu. Selama ini hanya orang (termasuk perempuan Bali) yang beranggapan bahwa karier hanya sebatas suatu pekerjaan yang bisa diperoleh di bidang politik, ekonomi, seni, dan umumnya dihubungkan dengan pekerjaan di kantor, pemerintahan, atau perusahaan. Tentu saja, pandangan ini terlalu sempit. Padahal, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga pun bisa diangkat sebagai sebuah karier dan bukan hanya merupakan tugas kalau mau membekali diri dengan pengetahuan luas seperti kepemimpinan, psikologi perkembangan, memasak, sampai ke menata kebun, dll. Pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan profesional yang menjanjikan.

Tidak diragukan lagi daya juang perempuan Bali untuk melangsungkan kehidupan. Amat jarang perempuan Bali pengangguran atau tidak bekerja. Setidak- tidaknya, perempuan Bali membantu meringankan beban keluarga dalam hal penghasilan dan ekonomi. Karier yang dimaksudkan di sini adalah karier yang dikerjakan baik di dalam rumah maupun meninggalkan rumah. Fenomena di lapangan membuktikan bahwa apabila ada kesempatan, perempuan Bali tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sepanjang perempuan itu memiliki keberanian dan tidak terlalu mempermasalahkan aspek sosial budaya atau tidak menganggap sosial budaya sebagai hambatan, selama itu pula perempuan Bali berpeluang besar untuk mengembangkan kariernya. Peluang kerja perempuan dalam pasar kerja di Bali dapat dilihat dari aspek tingkat partisipasi angkatan kerja dalam tabel di bawah ini (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
2003	85,70	65,23	75,44
2004	86,54	66,72	76,54
2005	85,94	72,19	79,06

Sumber: *BPS Provinsi Bali Tahun 2003-2005*

4.10.2. Aspek Pengembangan Budaya/Adat

4.10.2.1. Hukum Waris

Sistem kekerabatan patrilineal pada dasarnya memandang bahwa anak laki-laki mempunyai nilai lebih tinggi dan lebih penting dalam kehidupan keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dan sebagai pewaris sehingga harapan keluarga di masa depan baik dalam hal *ayahan* (kewajiban di desa adat), pemeliharaan di tempat suci, *pengabenan* (pembakaran mayat) ada di pundak anak laki-laki. Sementara anak perempuan tidak mempunyai kewajiban yang demikian karena setelah anak perempuan menikah maka secara hukum adat Bali dianggap putus hubungan atas hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya dan selanjutnya menjadi tanggung

jawab suaminya. Hukum adat waris Bali memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (material dan immaterial) dari suatu angkatan manusia/generasi kepada turunan laki-laki dan perempuan yang berstatus laki-laki (*purusa*). Menurut ketentuan *awig-awig* (peraturan), dapat diketahui bahwa ahli waris adalah keturunan laki-laki dan penggantian tempat dalam warisan yang juga melalui/ mengutamakan garis laki-laki. Secara substansial, ketentuan *awig-awig* tersebut bersifat patrilineal dan menunjukkan ketentuan yang *bias gender/bias* laki-laki. Ketentuan normatifnya sebagai semacam produk hukum positif menampakkan ketentuan yang diskriminatif.

Ahli waris mempunyai hak terhadap harta warisan dan selanjutnya juga berkewajiban untuk:

1. menerima serta mengurus warisan dari leluhurnya dengan kewajiban untuk memelihara pemerajan (tempat pemujaan/tempat sembahyang), membuat upacara, serta mengganti ayah-ayahan (kewajiban) pewaris;
2. melaksanakan upacara pitra yadnya untuk pewaris;
3. membayar hutang-hutang pewaris.

Dengan demikian, menjadi ahli waris, yang menerima harta warisan, sesungguhnya tidak berarti enak. Dalam hukum waris Bali, ahli waris bukan hanya mewaris hak, tetapi juga mewarisi kewajiban. Bahkan, lazimnya menurut nilai etika Bali, kewajiban sebagai ahli waris harus lebih didahulukan daripada hak.

Dilihat dari segi harta warisan, ada sistem kewarisan kolektif dan individual. Pada sistem kewarisan kolektif harta warisan diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris, seperti harta pusaka, kekayaan yang bernilai religius, harta kekayaan keluarga yang berupa *duwe tengah* (milik keluarga besar) dalam satu lingkungan *sanggah gede* (keluarga besar).

4.10.2.2. Partisipasi/Kesempatan Bicara

Dalam konteks lingkungan Bali, hukum adat masih dominan berlaku. Di *banjar* (desa adat), tidak ada anggota inti perempuan. Hal ini akan berdampak tidak akan pernah ada perempuan yang ikut terlibat mengambil keputusan di banjar. Perempuan tidak pernah disertakan dalam *sangkep banjar* (rapat desa). Sebenarnya ada istilah *sentana rajeg* atau *kawin nyeburin*, wanita berstatus sebagai pria, begitu pula sebaliknya. Namun, dalam adat-istiadat Bali, lelaki akan tetap menjadi anggota *banjar*. Dengan kata lain, meskipun status perempuan sebagai *purusa* (laki-laki), tetap saja laki-laki yang menghadiri *sangkep banjar* tersebut

Nah, dalam paruman-paruman (rapat-rapat mengenai adat) banjar, perempuan tidak pernah diikutsertakan. Kalau memang perempuan di banjar itu punya pemikiran-pemikiran moderat yang bisa diadopsi untuk menyusun suatu kebijakan, kenapa tidak? Ke depan mestinya ada terobosan seperi itu. Legislator perempuan sedikit suaranya, baru beberapa orang perempuan menjadi anggota DPRD di provinsi- maupun Kabupaten/kota di Bali. Seharusnya mereka yang segelintir tersebut mampu menunjukkan kinerja sebagai anggota legislatif yang membawa aspirasi masyarakat, namun myatanyahampir tak berperan. Di Bali, peran perempuan dikalahkan adat yang sangat kental dan tidak bisa lepas dari Perempuan.

Angeapan adat Bali akan tersingkir sedikit demi sedikit jika perempuan berperan penuh bekerja di sektor pemerintahan.

Bagaimana agar adat dan perempuan sama-sama jalan perannya? Di *banjar* tidak ada peraturan perempuan tidak boleh *ngayah banjar*, tetapi umumnya yang, sangkep laki-laki. Kondisi ini masih menandakan bahwa kaum laki-laki mendominasi perempuan. Perspektif gender, tidak melihat hanya perempuannya, tetapi juga laki-laki, sebab kepentingan keduanya sama, baik pendidikan maupun sebagai tenaga kerja, dll. Saat ini hampir tak ada keluarga yang hanya bisa hidup dari satu sumber pendapatan. Harus keduanya yang berjuang untuk semua kebutuhan. Memang suami istri merupakan satu kesatuan, namun bukan dalam bentuk istri mengurus rumah tangga saja dan suami berkiprah di luar rumah,

4.10.23. Personifikasi Dewi/Symbolisasi Perempuan

Menurut kepercayaan Hindu Bali, dewa adalah manifestasi Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahaesa). Dalam manifestasinya memiliki *sakti* (istri), yaitu Dewi. Masyarakat Bali memandang bahwa para dewa dan dewi itu mendapatkan penghargaan sama dari pengaminyanya. Tidak ada yang memandang Dewi Saraswati, misalnya, lebih rendah dari suaminya, Dewa Brahma. Semuanya dihormati sama bergantung pada posisi dan kemampuannya. Jadi, di masyarakat Bali tidak ada perbedaan dalam peranan antara perempuan dan laki-laki: yang berbeda hanyalah fungsinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memberi penghargaan yang besar pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pemujaan yang ditujukan kepada dewi yang dianggap dapat membantu kehidupan manusia di dunia ini. Pemujaan sebagai tanda bakti dan terima kasih dipersembahkan untuk Dewi Sri (dewi padi) yang merupakan sumber kehidupan manusia.

Pemujaan sebagai tanda bakti dan terima kasih juga ditujukan kepada Dewi Saraswati (dewi pengetahuan) yang dilambangkan sebagai seorang bertangan empat, berdiri di atas bunga teratai. Ia merupakan simbol perempuan yang harus diteladani karena dengan tasbih di tangan pertama, ia menyembah Hyang Widhi Wasa, dengan daun lontar di tangan kedua ia mendalami ilmu pengetahuan, dengan alat musik di tangan ketiga, ia menikmati dan mengumandangkan keindahan dan seni, dan dengan sekuntum bunga di tangan ke empat ia menyebarkan keharuman dan kelembutan. Dewi Saraswati berdiri di atas bunga teratai melambangkan ia sebagai perempuan mampu berdiri di dalam situasi apapun.

Dewi Durga, istri Dewa Siwa, mempunyai kekuatan magis yang luar biasa yang dapat memberi kekuatan dan menghidupkan kehidupan ini. Sri Sedana merupakan Dewi Uang yang mempengaruhi perekonomian seseorang. Pemujaan yang dilakukan masyarakat Hindu terhadap dewi-dewi itu menggambarkan bahwa masyarakat Bali Hindu memberi penghormatan dan pemujaan yang sama terhadap dewi dan dewa. Keduanya mempunyai

tugas dan kemampuan yang berbeda. Demikian juga dalam cerita pewayangan arja, topeng, dan cerita- cerita rayat banyak ditonjolkan peran perempuan yang tangguh, mandiri, berpengetahuan luas dan mampu menjadi permaisuri atau ratu yang disegani oleh masyarakat.

4.11. Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bali (Temuan Penelitian)

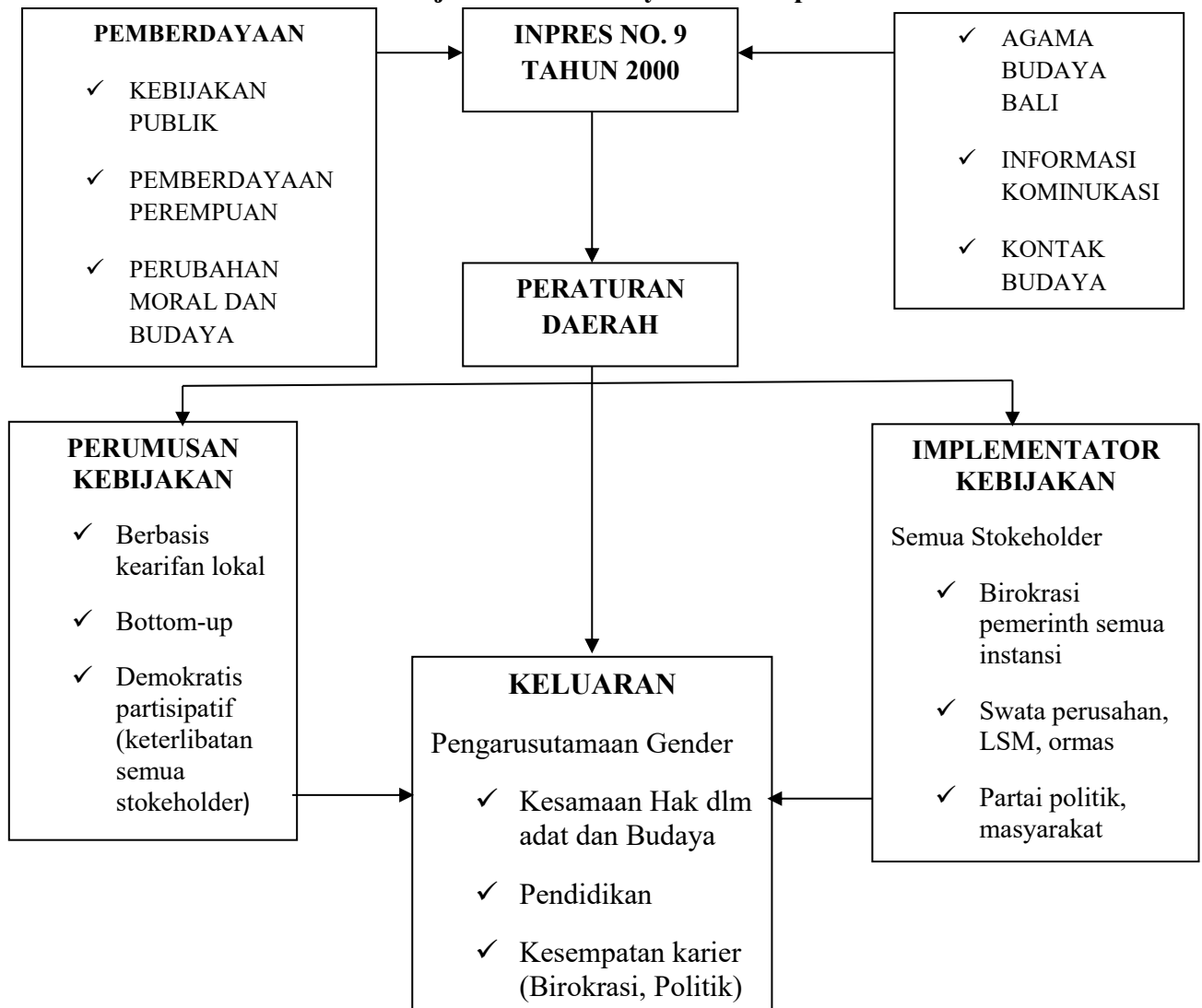
Bab Pembahasan ini akan diakhiri dengan menyarikan temuan penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik model kebijakan perempuan Bali sebagai berikut.

- 1) Kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan telah diupayakan sedemikian rupa dari tingkat Presiden, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di pusat provinsi, dan di kabupaten/kota, namun kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di Bali sendiri ternyata belum ada Peraturan Daerah (Perda) mengatur tentang gender. Praktis, kesenjangan gender dalam pemberdayaan masih terjadi, sehingga kebijakan publik tentang pemberdayaan perempuan harus terus diimplementasikan dengan makin membuka peluang untuk terlibat berpartisipasi setiap stakeholder.

Telah terjadi perubahan persepsi dan konsep perempuan Bali tentang konsep dirinya. Sejauh ini mereka tidak melakukan gerakan ekspresif dan atraktif. Perubahan budaya dan sikap perempuan terjadi secara evolusioner yang adaptif terhadap pengaruh global. Perubahan itu tidak mengubah sistem budaya yang mereka pegang dan anut.

- 1) Perubahan tersebut terjadi pada sisi perilaku mereka dengan pergerakan secara alamiah. Bagi perempuan Bali, gerakan feminisme yang dilakukan secara terbuka, radikal, dianggap tabu dan bertentangan dengan ajaran agama, budaya dan adat istiadat. Mereka lebih memilih pergeseran peran perempuan secara diam-diam. Namun berdaya efektif dan semakin kuat di ranah publik dengan tidak merusak sistem yang dianut bersama, sehingga pada akhirnya diakui dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali terdapat sebagai berikut:

Gambar 4.2
Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bali



4.12. Prinsip-prinsip Mekanisme Kebijakan Model kebijakan

Pertama, prinsip mekanisasi. Perumusan mekanisme model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali adalah persoalan merumuskan hubungan mekanis antarberbagai pihak dalam proses kebijakan. Hubungan mekanis ini memungkinkan proses

kebijakan bergulir mengingat aksi seorang aktor atau suatu agensi/lembaga/organisasi akan direaksi oleh pihak yang lain. Ini berarti bahwa:

- 1) Yang perlu dirumuskan dalam mekanisme bukan hanya kausalitas normatif (entah mengikuti norma demokrasi, norma masyarakat lokal atau norma apa) namun juga kausalitas aksi-reaksi. Sebagaimana dicontohkan di atas, proses kebijakan. Pemberdayaan perempuan Bali tidak bergulir manakala mekanisme baru yang dirumuskan dalam UUPerda tidak diyakini masyarakat akan bisa diterapkan. Kalau

mereka tetap saja apatis terhadap mekanisme yang ada maka dominasi pejabat dalam proses kebijakan tetap berlangsung, dan agenda pengembangan partisipasi akan gagal.

- 2) Mekanisme tidak cukup difahami secara tatanan prosedural, namun juga perangkat antisipasi dinamika social. Tidak adanya mekanisme yang jelas menyebabkan proses kebijakan sarat dengan kontlik dan kekerasan. Dengan adanya mekanisme yang baku dan diterima dan diakui para pelaku, maka masing-masing yang terlibat dalam proses kebijakan bisa mengadu siasat, namun pada akhirnya dia harus tunduk pada apapun yang dicapai dalam mekanisme tersebut. Sebaliknya, kesalahan masa lalu yang melebih-lebihkan arti penting mekanisme sampai-sampai menganggap mekanisme tersebut berubah sekedar sebagai formalitas, perlu dihindari.
- 3) Pengembangan partisipasi harus menjangkau aspek *supply* (peluang untuk berpartisipasi) maupun aspek *demand* (gerakan sosial-politik untuk ikut mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah). Hal ini hanya bisa ditegakkan kalau: (1) peminintah maupun masyarakat sanggup menegakkan aturan main. Mekanisme itu sendiri pada dasarnya adalah aturan main (2) modal sosial yang ada selama ini ikut didayagunakan

Kedua, prinsip pengelolaan perubahan sosial. Dalam hal ini ada dua persoalan:

- 1) Apakah kita mulai dari level mikro (aktor) untuk mengubah mekanisme, ataukah sebaliknya, sejumlah perubahan makro ditempuh duluan untuk memungkinkan kiprah pada level mikro bisa berlangsung mulus. Sebagai mana telah dikemukakan, mekanisme model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali didudukkan sekedar sebagai salah satu pilar pengembangan proses kebijakan yang memberdayakan perempuan Bali. Mekanisme ini bisa dilahirkan oleh perjuangan aktor-aktor multi pihak yang kemudian sepakat untuk membakukan rumusan dan membiasakan diri untuk mematuinya. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Berbagai perombakan makro struktural dilakukan yang pada gilirannya berbuntut memfasilitasi perubahan-perubahan mikro. Sehubungan dengan persoalan ini maka: (1) pengembangan mekanisme tidak cukup diserahkan pada perumusan ketentuan yuridis, (2) jaminan yuridis/ad ministratif yang diperoleh harus dikawal dengan aksi-aksi dan sejumlah "rekayasa" dalam rangka pembiasaan terhadap mekanisme baru, 3) Aktor-aktor yang menduduki posisi struktural dalam tubuh negara maupun dalam masyarakat perlu didorong untuk mendayagunakan posisi struktural tersebut untuk pembudayaan mekanisme baru.
- 2) Persoalan yang kedua adalah bagaimana inovasi awal bisa menggelinding laksana bola salju. Untuk itu advokasi lintas pihak yang sudah tergalang perlu dibentuk dan kemudian didayagunakan. Komunikasi lintas pihak, katakanlah antara aktor dalam tubuh negara dengan aktor dalam masyarakat, bisa menghasilkan sinergi yang, kalau dikelola dengan baik, bisa menjamin sustainabilitas.

4.13. Implikasi Teoretis

Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (*rwa bhineda*), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (*desa*), waktu (*kala*), dan kondisi riil di lapangan

(*patra*). Konsep *desa*, *kala*, dan *patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi antara kebudayaan Bali dan budaya luar seperti India (Hindu), Cina, dan Barat-khususnya di bidang kesenian telah menimbulkan kreativitas baru dalam seni rupa dan seni pertunjukan. Tema-tema dalam seni lukis, seni rupa, dan seni pertunjukan banyak dipengaruhi oleh budaya India. Demikian pula budaya Cina dan Barat/Eropa memberi nuansa baru pada produk seni Bali. Proses akulturasi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan adaptif, khususnya dalam kesenian, sehingga tetap mampu bertahan dan tidak kehilangan jati diri (Mantra 1996).

Kebudayaan Bali sejalan dengan pemikiran Berger (1991) yang menyatakan bahwa pola hubungan individu dengan masyarakat secara hakiki dibentuk oleh tiga momentum proses, yakni: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (dan/atau subjektivasi). Secara dialektis, eksternalisasi merupakan proses yang berpasangan dengan internalisasi sedangkan objektivasi merupakan proses yang berpasangan dengan subjektivasi. Karena kedua proses tersebut bukan kausalitas linear, adalah keliru manakala dinyatakan bahwa proses satu merupakan sebab dan proses lain merupakan akibat. Dalam kerangka pemikiran dialektika fenomenologis, dapat dikatakan bahwa setiap momentum proses merupakan sebab sekaligus akibat atau akibat sekaligus sebab. Dengan demikian dinamika kebudayaan dan eksistensi manusia adalah suatu "tindakan penyeimbang" yang berlangsung terus-menerus antara manusia dan dirinya dan antara manusia dan dunianya

Ardener berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan adalah sebuah masalah gender yang unik pada antropologi sosial. Akan tetapi, hal ini kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh rekan kerjanya, Shirley Ardener, yang menyadari bahwa kebungkaman kelompok yang terjadi pada kolektif yang kurang atau tidak berkuasa-menimpa kelompok-kelompok yang menempati tempat paling akhir dan tingkatan masyarakat. Orang-orang yang hanya memiliki kekuasaan terendah dalam masyarakatnya bermasalah dengan persoalan menyuarakan persepsi dan aspirasi mereka. Ardener mengatakan bahwa struktur kebungkaman mereka "ada", tetapi tidak bisa dicapai dengan struktur bahasa dominan. Dengan struktur bahasa dominan, kehadiran atau ketidakhadiran perempuan tidak diperhitungkan: kehadiran perempuan tidak menambah dan ketidakhadirannya pun tidak mengurangi. Hasilnya adalah mereka dipandang rendah, diredam, dan dibuat tidak tampak dalam keseluruhan persepsi sosial.

Di sini pandangan Ardener sejalan dengan Hipotesis Sapir-Whorf tentang relativitas bahasa (*linguistic relativity*). Relativitas bahasa berbicara mengenai relasi antara bahasa, realitas, dan perilaku manusia. Dunia realitas manusia, menurut Hipotesis Sapir-Whorf, ditentukan semata-mata oleh struktur dan kosakata bahasa yang dominan di masyarakat (Carroll, 1956). Dalam konteks dinomerduakannya keberadaan perempuan Bali, dapat dikatakan bahwa bagaimana perempuan Bali diperlakukan sangat ditentukan oleh bagaimana bahasa Bali menggambarkan perempuan. Jika diyakini bahwa bahasa Bali mencerminkan

budaya masyarakatnya, sementara masyarakat memang bahwa bahasa Bali yang dominan dalam kehidupan sehari-hari juga menomorduakan eksistensi perempuan. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai bahasa Bali sesungguhnya merupakan cara berfikir, cara memandang, dan cara mempersepsi kaum lelaki Bali. Artinya, setiap orang-siapa pun termasuk kaum

perempuan yang sedang berpikir dan berbicara dengan dan dalam bahasa Bali pastilah berarti sedang berpikir dan berbicara menurut bahasa lelaki (cf. Carrol, 1956).

Apakah perempuan Bali menderita, bagaimana perempuan Bali mempersepsi diridan memikirkan lingkungannya sangat bergantung pada bagaimana pandangan lelaki Balimengenai perempuan. Sementara, pandangan lelaki mengenai perempuan ditentukan oleh bagaimana budaya menempatkan perempuan. Karena budaya ditentukan oleh kultur patriarki, dengan hipotesis Sapir-Whorf ini bahasa Bali sesungguhnya dapat dibacasebagai "bahasa lelaki Bali". Maka, inilah sebabnya mengapa eksistensi perempuan Bali "hilang terbenam" dalam budaya masyarakatnya.

Kembali pada Edwin Ardener, ia membuktikan bahwa fenomena "hilangnyaperempuan terjadi karena dua hal. *Pertama*, peneliti tidak mendengarkan suara-suara darikalangan yang tidak berdaya (*powerless*) (yang dalam hal ini perempuan). Mereka biasamenyimak hanya dari kalangan laki-laki dan mendengarkan bahasa laki-laki; mereka tidak mencari atau memahami suara-suara dari kalangan perempuan dalam prosespenelitiannya. *Kedua*, laki-laki menciptakan makna bagi suatu kelompok, termasukmakna untuk perempuan. Perempuan yang tertindas dan terbungkam dalam budaya inimembawa pada ketidakmampuan perempuan untuk dengan lantang mengekspresikandirinya dalam dunia yang didominasi laki-laki dan dalam bahasa yang sesungguhnyaadalah "bahasa lelaki".

Teori kelompok yang dibungkam ini kemudian dikembangkan secara lebihlengkap oleh Kramarae. Ia menemukan bahwa perempuan dalam kartun biasanyadilukiskan sebagai emosional, apologetik (peminta maaf, penyesal), peragu, dan plin-plan, sedangkan pernyataan yang lugas, sederhana, dan kuat disuarakan oleh laki-laki. Teori ini telah dilantangkan terutama dalam teori feminis, untuk merepresentasikanperempuan sebagai kelompok yang dibungkam, tetapi bisa juga diterapkan padakelompok budaya marginal lainnya. Dalam hal ini, Orbe (1998) menjelaskan, "Di dalam masyarakat yang memelihara hubungan kekuasaan yang asimetris, di sanalah kerangkakelompok yang dibungkam berada." Dalam lingkup komunikasi, teori ini termasukkonteks kultural yang mengkaji gender dan komunikasi sebagai salah satu dari teorikritis (cf. Littlejohn, 1996).

4.14. Implikasi Praktis

Untuk kasus masyarakat Bali perjuangan feminisme, kesetaraan gender, dandiskriminasi gender tampak tidak mendapat tempat bagi perempuan. Perempuan Bali lebih suka memilih mematuhi ajaran agama dan budaya mereka dengan cara menjagaajaran itu. Meski demikian, secara alamiah kesetaraan itu akan datang sendirinya sejalandengan perubahan dan tuntutan budaya global.

Memang terdapat kerumitan tersendiri untuk mengelaborasi perempuan Bali dalam perubahan budaya secara mendasar. Prinsip utama dalam studi kebudayaanmengasumsikan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang monokultur. Tidak adabudaya tunggal di dalam

suatu komunitas. yang luas. Kalau itu terjadi di Bali, yang dikenal bukanlah budaya Bali, melainkan budaya masyarakat Bali.

Sketsa filosofi kebudayaan membantu siapa pun yang ingin mengenal segala energi yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan suatu kebudayaan. Mengetahui energi yang menggerakkan manusia berarti mengetahui manusia dengan hasil karyanya. Ini tidak lain dari suatu usaha mengetahui semesta budaya itu dalam seluruh esensi dan eksistensinya; terutama di dalamnya manusia sebab manusia adalah suatu produk budaya manusia juga adalah penghasil budaya, dan manusia kemudian membiarkan diri diatur oleh sistem di dalam kebudayaannya.

Bahwa manusia berbudaya tidak dapat dilepaskan dan masyarakat tempat manusia itu ada dan berkomunitas. Intinya adalah budaya yang dihasilkan manusia adalah budaya manusia di dalam masyarakat, dan selanjutnya masyarakat itu yang memberi legitimasi sosial dan filosofis kepada manusia untuk bertindak. Hal itu kemudian nyata dalam apa yang sering disebut sebagai "manusia beradab. Hal beradabnya manusia adalah suatu kenyataan berbudaya yang disahkan oleh masyarakat. Masyarakat menetapkan standar norma umum (*common ground morality*) dan manusia hidup di dalamnya. Ini adalah bukti legitimasi sosial.

Perempuan Bali adalah manusia yang dinamis, bereksistensi, dan tidak pernah menjadi subjek yang final. Sebagai manusia yang dinamis, ia bergerak dan beraktivitas di dalam komunitasnya, atau juga memasuki ruang publik yang terbuka dan menantang. Pada saat itu, ia menjadi dirinya yang beraktivitas (*active*).

Sebagai manusia yang bereksistensi, ia adalah makhluk yang selalu mencari makna dalam kesejatiannya. Ia menghadapi dirinya bukan sebatas sebagai fakta, tetapi juga sebagai suatu masalah, sehingga dari kondisi ini ia selalu mempertanyakan argumentasi-argumentasi mengapa ia ada dan mengapa ia bereksistensi. Argumentasi-argumentasi itu mengarahkan dirinya pada pengembangan "potensi di dalam diri maupun di dalam masyarakat.

Sebagai subjek yang belum final, perempuan Bali bukanlah hasil ciptaan yang tidak tuntas oleh Penciptanya. Secara fisik dan psikis ia diciptakan tuntas, tetapi eksistensi kemuliaannya adalah suatu proses "menjadi" (*on being human*). Di dalam proses menjadi itu, ia dihadapkan pada apa yang Watloly sebutkan sebagai tantangan globalitas dan lokalitasnya.

Berdasarkan berbagai pandangan di muka, dapat dideskripsikan karakteristik yang dapat dilekatkan pada perempuan Bali, sebagai berikut.

1. Perempuan Bali patuh adat
2. Perempuan Bali ulet.
3. Perempuan Bali agamis (religius).
4. Perempuan Bali suka hidup bersama dan Jujur (beretik sosial).
5. Perempuan Bali cinta persatuan dan kesatuan.
6. Perempuan Bali terbuka dan mau bermusyawarah (inklusif, demokratis)

Ada beberapa hal yang dapat dimaknai dari deskripsi terhadap perempuan Bali ini, sebagai berikut.

Pertama, perempuan Bali seperti itu adalah suatu perampatan dan pemberian kesimpulan) mengenai bagaimana kebudayaan Bali membentuk basis-basis eksistensi perempuan Bali. Tiga sketsa pertama, yakni sketsa manusia patuh adat, manusia ulet dan

budaya dan adat yang sempurna. Mereka lahir di dalam kebudayaannya, diperlakukan sejak dari dalam kandungan sampai meninggal, juga dengan sentuhan adat yang konsisten. Adat karena itu menjadi sistem norma yang bisa menjelaskan eksistensi perempuan Bali baik personal maupun komunal. Adat karena itu membentuk basis-basis genealogis, atau asal-usul manusia. Karena itu masyarakat Indonesia lebih bercorak *socio-genealogis* ketimbang *socio-politis*.

Keterpautan adat dan eksistensi ini yang mungkin juga di maknai Jacques Derrida tentang kemurnian eksistensi. Eksistensi manusia tidak bisa dihindarkan walaupun sering ada juga ketidakmurnian. Maksudnya, bisa saja suatu eksistensi yang dipahami bersumber dari "asal-usul" yang tampaknya sederhana ternyata datang dari "bukan asal-usul".

Kedua, perempuan Bali yang mencari eksistensinya adalah manusia adat dan sekaligus agamis. Karakter ini muncul secara ambivalen karena agama-agama tradisional akhirnya mengendap ke dalam tata cara ritual adat, sementara agama-agama yang datang dari luar struktur dominan di dalam sistem kepercayaan masyarakat. Faktor inilah yang membuat perempuan Bali yang patuh adat dan agamis kadang tampil sebagai person yang dualis, dalam arti orientasi kepercayaannya masih melekat pada adat, tetapi juga didominasi oleh agama yang dianutnya. Namun justru di sinilah perempuan Bali dapat lebih dikenali sebagai manusia yang sangat dinamis mengekspresi budaya dan agamanya atau berperilaku sebagai penganut agama yang bercorak kultural. Karena itu, penyebutan Hindu lebih menyentuh rasa budaya orang Bali ketimbang sensitivitas fanatisme agamanya.

Ketiga, perempuan Bali adalah manusia yang terbuka pada gempuran perubahan sosial baik dari dalam (Indonesia) maupun dari luar (global). Sejarah masyarakat manusia Bali akan membentangkan sebuah narasi bahwa gempuran global itu telah terjadi sejak lama. Itu pertanda bahwa karakter keempat sampai ketujuh adalah suatu mekanisme pertahanan sosial (*social resistance mechanism*) yang dihasilkan masyarakat manusia Bali dalam kontak dengan perubahan sosial yang menerpanya.

Di sini penulis harus berani mengatakan bahwa walau berhadapan dengan gempuran global, seluruh karakter itu adalah hasil transformasi bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) Mereka. Sikap jujur dan terbuka adalah suatu perilaku sosial yang merupakan hasil transformasi dari perilaku orang Bali yang "apa adanya". Sebaliknya, rasa cinta persatuan dan kesatuan adalah mekanisme yang ditransformasi dari perilaku manusia Bali yang suka mencari titik harmoni atau keseimbangan.

Sesuai dengan hasil penelitian ini, perempuan Bali mengambil bentuk kesetaraan gender. Pertama-tama, ini akan dicoba ditelaah dari sudut pandang Marx, yang menganut metode dialektika Hegel dan Ludwig Feuerbach. Pengaruh kedua orang ini terhadap Marx tampak dalam kerangka pemahaman Marx mengenai alienasi (*entfremchung*); suatu konsepsi yang sangat berpengaruh di dalam teori sosialnya. Menurut Mayo (1960), dalam *Introduction to Marxist Theory*, realitas kaum borjuis dan proletar yang disintesiskan Marx tidak bisa dilepaskan dari fenomenologi Hegel dan Feuerbach serta teori alienasi itu

Di bawah pengaruh Hegel dan Feuerbach itu, Marx melihat bahwa manusia adalah subjek yang menciptakan objek tertentu. Dalam penciptaan itu, manusia menunjukkan eksistensinya di dunia melalui "kerja" (*labor*). Manusia disebutnya sebagai *homo faber* (makhluk pekerja). Kerja juga yang membuat manusia jelas bisa dibedakan dari hewan. Dalam kondisinya itu, manusia bekerja, makan, bersantai, dan bersantai. Akan tetapi, suatu

waktu ketika terjebak di dalam beban kerja yang sangat berat, ia tidak bisa beristirahat, makan, rileks, bahkan tidak ada waktu bebas (*free time*). Dalam kondisi seperti ini, ia tidak lebih baik dari seekor hewan, informasi yang tampak dalam masyarakat Jenan kala itu saat para "budak kapitalis" (kaum proletar) telah dijadikan komoditi kerja oleh para borjuis. Di luar dunia industri, kaum proletar pada para petani penggarap juga tidak lebih dari objek kerja; ia

harus melakukan serangkaian aktivitas produksi tanpa waktu istirahat (*free time*). Mereka kerja melebihi jam kerja yang semestinya (*over time*).

Menurut Marx, kerja berat seperti itulah yang mengalienasi manusia dari produksi dan aktivitas produksinya dan jelas lagi-lagi ini tidak berbeda dan binatang, Dalam salah satu tulisannya bersama Engels, Marx dan Engels berkata sebagai berikut:

"manusia (pekerja) hanya merasa dirinya bebas beraktifitas dalam fungsi hewannya makan, minum, prokreasi, atau menetap dan berpakaian, dll: dan di fungsi manusiawinya tidak tampak ketika ia merasa dirinya bukan siapa-siapa melainkan sekedar seekor binatang. Siapa yang binatang yang menjadi manusia dan manusia yang menjadi binatang".

Hal masyarakat (*society*) dilihat Marx sebagai suatu kompromi gerakan dari suatu antitesis, yakni adanya suatu perubahan sosial secara umum melalui ketegangan dan perjuangan (*tension and struggle*). Di sini Marx dipengaruhi oleh teori evolusi, tetapi ia sendiri yakin bahwa teorinya itu adalah suatu gelombang perubahan yang revolusioner (Mayo, 1960).

Karena itu, walau di bawah pengaruh Hegel, Marx lebih suka berkata bahwa masyarakat itu berkembang bukan karena suatu lingkaran struktur, melainkan suatu perkembangan total dan menyeluruh. Ketergantungan variabel independen sebagai unsure terjadinya perubahan di dalam masyarakat seperti dalam teori Hegel tidak dimutlakkan begitu saja oleh Marx. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa sistem Hegel itu adalah suatu mode produksi ekonomi.

Karena itu, menurut Marx perubahan di dalam masyarakat tidak bisa dilihat semata dari mode ekonomi. Situasi ekonomi, menurut Marx, bukanlah suatu *sole active cause* (unsur pengubah satu-satunya), tetapi relasi timbal balik antara semua aspek sosial, seperti politik, hukum, filsafat, sastra, seni, dan semuanya terhisab ke dalam ekonomi melalui apa yang disebutnya sebagai "relasi sosial" (*social relation*). Dengan kata lain, ekonomi (kondisi material) menentukan agama, budaya, seni, politik, filsafat, hukum (kondisi psikologis)-inilah inti Materialisme Historis yang digagas Marx (cf. Mayo, 1960).

Karena itu, mode produksi ekonomi adalah suatu bentuk pengungkapan material dari apa yang disebut relasi antarmanusia yang selalu mengarah pada pencapaian tujuan tertentu, yaitu stabilisasi sosial dalam masyarakat. Mengapa orang mengklaim Marx sebagai peletak dasar teori konflik, walau sebenarnya Marx lebih suka menyebut teorinya sebagai perjuangan kelas? Marx tidak pernah menyangkali hal itu, tetapi ia lebih melihat bagaimana peran kelas (*class role*) sebagai unsur penentu perubahan struktur masyarakat. Kata struktur masyarakat ini karena yang mengatakan Marx – pastilah merujuk pada struktur sosial ekonomi di bawah Kapitalisme, suatu ideologi yang hendak dilawan Marx. Baginya, posisi kelas yang berbeda telah dibentuk oleh mekanisme pembagian kerja yang ambivalen dan terkesan mengejar angka

produksi. Disini kepentingan kelas menjadi lebih dominan dan struktur kerja menjadi tidak seimbang.

Karena itu konfrontasi antarindividu sering terjadi di dalam masyarakat semata-mata karena kelas dominan (borjuis) telah mengubah setiap bentuk relasi sosial dari suatu relasi produksi (relationship of production) menjadi relasi material yang digerakkan menjadi kekuatan produksi (force of production). Pengerahan ini yang membuat manusiatersublimasi menjadi objek dari kerja, dan karena itu ketika digunakan teknologi modern, mereka menjadi komponen di dalam mesin itu pula. Maka, kedudukan manusia buruh (termasuk perempuan buruh), misalnya, sejajar dengan mesin, truk, oli, bahan baku, dst. (Mayo, 1960). Bahwa di sini terjadi proses rapi dehumanisasi- itu tidak bisa dibantah. Karena itu, perjuangan kelas yang dimaksudkan Marx sebenarnya adalah perjuangan untuk membangun apa yang ia sebut sebagai *the holy family*. Di dalam *the holy family* ini setiap orang yang bekerja berhak mendapat perlakuan sebagai manusia dan berhak sejahtera, karena itu berhak atas upah yang layak, dan tidak dibenarkan menjadi “budak” yang bekerja tanpa hari istirahat (*free time*), tanpa jaminan, tanpa kepastian masa depan. Itu yang dimaksudkan Marx dengan masyarakat yang ideal, atau masyarakat tanpa kelas-sesuatu yang hingga kini masih merupakan “mimpi” kaum buruh yang masih harus di perjuangkan. Sementara itu, pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah pandangan rasionalisme yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat, model rasionalisme akan mewarnai semua aspek kehidupan. Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam waktu singkat berkat teknologi satelit dan komputer. Perubahan budaya lokal dan sosial akibat revolusi informasi ini tidak dapat dielakkan. Masyarakat perkotaan yang memiliki akses terdapat informasi merupakan kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh budaya global.

Meskipun masyarakat Bali terbentuk dalam budaya patriarmonial, dan secara stratifikasi sosial terpisah-pisahkan dalam kasta, nilai religi lebih kuat mengikat dan memaknakan mereka akan lebih pentingnya hidup harmoni tanpa pertentangan kelas yang harus diratakan melalui perjuangan kelas. Pemisahan masyarakat dalam kasta dan peran dominan laki-laki atas perempuan di mata masyarakat Bali, termasuk perempuannya-sudah menjadi ketentuan yang harus diterima sebagai takdir. Namun, sejalan dengan perubahan budaya global dan semakin meningkatnya rasionalitas masyarakat (termasuk perempuan), kompromi-kompromi baru secara alamiah akan terbentuk. Dengan demikian, teori Marx dan Weber tidak sejalan dengan penubahan masyarakat dan budaya di Bali, meskipun konteks sosialnya mungkin mirip. Dapat pula dikatakan di sini bahwa untuk menyetarakan kedudukan dan peran perempuan dengan lelaki dan juga untuk memperbaiki nasib perempuan, masyarakat Bali tidak harus meminta bantuan gagasan perjuangan kelas dari Karl Marx dan meminjam mode rasionalisme dari Weber.

Maka, yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah Teori Keseimbangan (*Equilibrium Theory*) yang menekankan pada konsep kemitrasejajaranan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam perspektif Teori Keseimbangan, keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa, dan negara. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan, saling menolak, saling meniadakan, tetapi merupakan hubungan komplementer

yang saling melengkapi; keragaman peran (faktor biologis, etnis, aspirasi, pilihan budaya, dll.) pada hakikatnya adalah realitas kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan, yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerja sama yang setara.

Kebijakan publik yang telah diambil melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah bukti konkret upaya untuk menghapus ketimpangan gender dan pada saat yang sama juga membangun kesetaraan relasi antar gender. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, dalam setiap kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan di Bali hendaknya memperhitungkan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang serta mempertimbangan kearifan lokal berbasis agama, budaya, dan adat Bali.

Kebijakan pada hakikinya merupakan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatasi masalah tertentu. Keputusan atau Kebijakan tersebut diambil atau berlangsung dalam suatu sistem dan melalui suatu proses. Dalam hubungan itu, ada baiknya apabila terlebih dahulu kita rumuskan pengertian, unsur, dan lingkup sistem Kebijakan (*policy system*). Pada kesempatan ini, definisi kerja (*working definition*) mengenai sistem kebijakan, yaitu *tatanan kelembagaan* yang berperan atau merupakan “wahana” dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan “proses kebijakan” (*formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja*) yang mengakomodasikan kegiatan teknis (*technical process*) maupun sosiopolitis (*socio-political process*) serta saling hubungan atau interaksi antar empat faktor dinamik (1) lingkungan kebijakan, (2) pembuat dan pelaksana kebijakan, (3) kebijakan itu sendiri, dan (4) kelompok sasaran kebijakan (lihat Mustopadidjaja AR, UI-Press 1985; dan LAN-2001).

Sebagaimana lazimnya suatu tatanan kelembagaan yang senantiasa mengandung dimensi nilai, demikian pula dengan sistem kebijakan. Dimensi nilai dalam sistem kebijakan terekspresikan dalam dan berperan sebagai *landasan, norma, dan cita-cita (nilai-nilai dasar), tujuan dan aturan bermain (nilai-nilai instrumental)* yang melekat pada dan merupakan karakteristik dari sistem tersebut.

Keempat faktor dinamik yang berperan dalam sistem dan proses kebijakan di atas, masing-masing dirumuskan sebagai berikut (1) lingkungan kebijakan (*policy environment*) adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya “isyus” kebijaksanaan (*policy issues*), yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan; (2) pembuat dan pelaksana kebijakan (*policy maker and implementer*), adalah orang atau sekelompok orang, atau organisasi yang mempunyai “peranan tertentu” dalam proses kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan atau pun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan atau pun dalam tahap lainnya, seperti pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan; (3) kebijakan itu sendiri (*policy contents*), yaitu keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu; dan (4) kelompok sasaran kebijakan (*target groups*), yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan

bersangkutan (Mustopadidjaja AR, 1988).

Menurut Dunn, sistem kebijakan dirumuskan sebagai “*the overall institutional pattern within which policies are made, involves interrelationships among three elements: public policies, policy stakeholders, and policy environments*” (Dunn, 1981). Berbeda dengan William Dunn, peneliti tidak membatasi peran kelembagaan dan *parastakeholders* hanya dalam pembuatan kebijakan, melainkan juga dalam proses kebijakan lainnya (pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja), dan secara eksplisit mengidentifikasi terbukanya peran kelompok sasaran di dalam proses tersebut.

Perhatian terhadap posisi, peran interaktif, dan kondisi kelompok sasaran dalam proses kebijakan adalah penting, karena akan mempengaruhi ketepatan, efisiensi, efektivitas, dan kinerja kebijakan. Merekalah yang secara langsung akan dipengaruhi perilaku dan keadaannya; dan pada umumnya merekalah yang sesungguhnya merupakan *constituent* dan sumber legitimasi setiap kebijakan publik. Pemerintah dan aparatur pemerintah dapat dipandang sebagai *stakeholder* yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan publik (*public interests*). Sebab itu adalah bijak apabila aspirasi mereka diperhatikan, dan langkah ini dijadikan sebagai kode etik (“*moral conducts*”) yang terlembagakan, dijadikan parameter legitimasi suatu kebijakan.

Dalam mengeksplorasi proses kebijakan ini kita cukup beruntung, sebab perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi politik, administrasi negara, dan kebijakan publik, telah memperkenalkan berbagai model *pembuatan* kebijakan, yang sebenarnya merefleksikan pula model proses kebijakan dalam arti dan lingkup definisi kerja di atas. Dalam hubungan itu dapat diidentifikasi antara lain model kelembagaan (kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintahan), model proses (kebijakan dipandang sebagai aktivitas politik), model elite (kebijakan dipandang sebagai preferensi elite), model kelompok (kebijakan dipandang sebagai konsensus kelompok), model rasional (kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara rasional, dan menjamin optimalitas sosial), model inkremental (kebijakan dipandang sebagai modifikasi kebijakan sebelumnya), dan model sistem (kebijakan dipandang sebagai keluaran dari sistem), model permaninan (kebijakan dipandang sebagai pilihan rasional dalam situasi yang kompetitif), dan model pilihan publik (kebijakan dipandang sebagai pembuatan keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan); (lihat antara lain Thomas R. Dye, 1995)

Sebagaimana model lainnya, model proses kebijakan juga merupakan simplikasi dari realitas yang jauh lebih kompleks dan dinamik. Sehingga untuk mendapatkan representasi yang lebih mendekati kenyataan, dapat pula dikembangkan suatu model yang mengkombinasikan beberapa variabel dan parameter relevan, yang mungkin tidak teridentifikasi dalam suatu model tetapi dinyatakan sebagai unsur eksplisit dalam model lainnya.

Di samping dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, sistem kebijakan dipengaruhi pula oleh sistem sosial politik ekonomi dan pemerintahan yang dianut dan lazimnya tertuang dalam konstitusi, oleh manajemen pemerintahan dan pembangunan yang dikembangkan, oleh perkembangan sejarah dan pengalaman bangsa dalam penyelenggaraan negara, serta oleh kemajuan bangsa di bidang iptek dan kompetensi SDM-nya. Berbagai faktor tersebut perlu diperhitungkan dalam pengembangan model sebagai dasar penyusunan sistem kebijakan yang aktual.

Berangkat dari berbagai pertimbangan di atas berkembang pilihan-pilihan mengenai sistem kebijakan, yang secara ekstrim dapat dibagi atas dua kelompok (1) yang bersifat sentralistik, otoriter, tertutup, non-partisipatif, dan (2) yang bersifat demokratis, desentralistik, transparan, partisipatif. Secara normatif sebenarnya negara bangsa kita memilih sistem kebijakan yang kedua (2); namun karena *kondisi-kondisi tertentu* dalam perkembangan hidup dan kehidupan bangsa, dalam realitasnya berkembang sistem kebijakan yang pertama (1).

Pilihan tersebut adalah sesuai dengan amanat dan semangat konstitusi. Dengan demikian alternatif model yang agaknya relevan untuk dipilih dan perlu kita kembangkan sebagai sistem kebijakan adalah yang beranjak dari model proses kebijakan yang demokratis, partisipatif, transparan, desentralistik, dan bertanggung jawaban. Yang ingin peneliti tambahkan sebagai karakteristik sistem tersebut adalah dimensi "*rational human cooperation*" dari disiplin administrasi, yang juga merupakan suatu parameter dari "model rasional". Sehingga sistem kebijakan yang perlu dikembangkan adalah yang demokratis, desentralistik, transparan, manusiawi, rasional, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas. Mungkin model yang berkembang pada kurun waktu tersebut bersifat rasional, namun tidak human. Akibatnya sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi politik bangsa menjadi rapuh. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan berbagai dampaknya yang luas merupakan bukti kerapuhan sistem dan proses kebijakan yang berkembang selama ini.

Konstitusi negara kita menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berbentuk negara kesatuan dengan *sistem dan proses* kebijakan yang mengakomodasikan peran masyarakat yang luas, di mana pengambilan keputusan politik yang strategis, seperti kebijakan-kebijakan pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa, dilakukan bersama secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga lembaga pemerintahan dan perwakilan [MPR; DPR, DPD, dan DPRD] sebagai representasi rakyat bangsa dari dan di seluruh wilayah negara yang terbagi atas daerah besar (Provinsi) dan kecil (Kabupaten/Kota, dan Desa). Demikian juga pengembangan kebijakan selanjutnya seperti Propenas/Propeda dan APBN(D), Undang-undang dan Perda, yang harus terjamin keserasian dan keterpaduannya sehingga mewujudkan sinergi dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan pembangunan yang terarah pada perwujudan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah tanah air mensyaratkan berkembangnya otonomi. Otonomi Daerah (OTODA) mengimperasikan *hak, kewajiban, dan tanggung jawab* ataupun *kewenangan* daerah untuk mengurus "rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan)" daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan otonomi; yaitu utamanya (1) meningkatkan kapabilitas dan kesejahteraan rakyat daerah, (2) meningkatkan prakarsa, kreativitas, dan peranserta masyarakat, dan (3) menjaga keserasian hubungan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah.

Dengan demikian, terselenggaranya pelayanan prima dan pengelolaan kebijakan secara konsisten, efisien, dan efektif sebagai fungsi penting pemerintahan untuk mencapai tujuan otonomi, diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Apabila pelayanan publik sudah dapat terselenggara secara prima di daerah, dan pengelolaan kebijakan (misalnya dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal dengan instrumen-instrumen yang kondusif) juga dapat dilaksanakan secara

arief, tepat, dan efektif oleh aparaturnya daerah, maka daya saing juga akan mengalami peningkatan. Kunci daya saing adalah efisiensi dan mutu, baik dalam pengelolaan pelayanan, maupun dalam ketepatan dan kepastian kebijakan. Hal ini menjadi daya tarik investasi, wisata, arus perdagangan daerah, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Hal tersebut juga merupakan prasyarat bagi peningkatan daya saing hasil produksi daerah dalam pasar nasional dan internasional.

Artinya kita mengasumsikan, atau mengharapkan, bahwa dengan otonomi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan berlangsung lebih efisien, efektif, lebih akomodatif, demokratis, dan berkualitas. Namun tentu kita perlu mengidentifikasi berbagai persyaratan atau kondisi yang perlu dipenuhi. Untuk mewujudkan harapan berotonomi tersebut, para *stakeholders* kebijakan perlu memiliki komitmen dan kompetensi tertentu. Di antara kompetensi yang perlu dimiliki *stakeholders* dalam proses kebijakan tersebut adalah *knowledge* dan *know how* dalam pengolahan kebijakan termasuk dalam penyusunan instrumen-instrumen kebijakan dan ketepatan dalam penetapan perangkat perundang-undangannya. Hal ini menyangkut ketepatan kebijakan dan kepastian hukum, yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan peningkatan daya saing daerah baik dalam lingkup nasional maupun dalam hubungan internasional. Sedangkan komitmen yang perlu dikembangkan adalah kesepakatan bersama semua komponen bangsa pada umumnya dan keseluruhan unsur aparaturnya negara pada khususnya, baik yang bertugas pada perangkat pemerintahan pusat maupun daerah, bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa akan senantiasa berperilaku konsisten dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hubungan itu, posisi lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem kebijakan dan administrasi negara kita adalah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab, sesuai posisi dan peran kelembagaan masing-masing dalam pengelolaan pelayanan dan kebijakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bernegara, harus didasarkan pada amanat dan semangat konstitusi tersebut.

Dalam sistem kebijakan yang demokratik, terbuka, desentralistik, rasional, manusiawi, partisipatif dan akuntabel, di mana berperan berbagai *stakeholders* dengan latar belakang dan perilaku yang berlainan, perlu dipertimbangkan sikap politik masing-masing dan pengaruhnya terhadap pilihan atas sejumlah kemungkinan alternatif atau opsi kebijakan yang sering berakibat kemacetan dalam penyusunan kebijakan publik. Sehubungan dengan itu, dalam menghadapi perubahan-perubahan besar Abad 21 ini, dalam pemikiran dan pengembangan mengenai sistem dan proses kebijakan perlu pula kita cermati dimensi kelembagaan yang penting di samping tatanan organisasi, yaitu tata nilai, norma, dan berbagai ketentuan yang disepakati perlu dipatuhi dan mengikat proses aksi dan interaksi keseluruhan *stakeholders*.

Demokrasi memang membenarkan adanya perbedaan dan kebebasan, adanya pluralitas. Namun demokrasi adalah sistem peradaban yang mengutamakan termanifestasikannya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam upaya mencapai tujuan bersama secara berkeadilan, dalam mewujudkan kepentingan publik, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai peradaban dan tujuan bernegara tersebut seharusnya menjadi komitmen bersama dan pengikat kebersamaan yang berlaku dalam setiap individu dan sistem kelembagaan, baik pemerintahan maupun

masyarakat bangsa. Nilai-nilai tersebut perlu termanifestasikan dalam dinamika kehidupan masyarakat, dalam penyelenggaraan negara, dalam sistem dan keseluruhan proses kebijakan dan kinerjanya. Dalam rangka reformasi total menuju masyarakat Indonesia Baru dan dalam menghadapi tantangan Abad 21 yang syarat dengan tuntutan demokratisasi, transparansi, daya saing, akuntabilitas, dan tegaknya HAM dewasa ini disamping perlu diakomodasi peran aktif yang luas dari masyarakat, juga berkembangnya sistem *checks and balances* dalam proses kebijakan, melalui berbagai institusi, kelompok kepentingan, dan partai-partai politik yang pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 telah berkembang mencapai jumlah demikian banyak. Karena itu, dalam menghadapi dinamika demokrasi dengan fenomena *euforia* dan pluralisme yang dewasa ini terasa melebar, diperlukan pula suatu dasar pendekatan bersama atau *paradigma* di mana setiap *stakeholders* dapat beranjak dan mengembangkan langkah-langkah objektif rasional dalam penyusunan agenda dan instrumen-instrumen kebijakan untuk menghadapi masalah-masalah bangsa ke depan. Persyaratan pokok yang perlu dipenuhi bagi efektifnya sistem kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah bangsa adalah bahwa para *stakeholders* memiliki komitmen atas penegakan nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan hukum; serta kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualifikasi lain yang perlu dipenuhi pula adalah sifat dan sikap yang rasional, interaktif, komunikatif, responsif, dan transparan. Hal ini mensyaratkan pula adanya kelengkapan dan ketepatan informasi disertai pemanfaatan teknologi informatika, sebagai sarana vital untuk pengambilan keputusan bersama, pemberian pelayanan publik secara prima, dan untuk membangun konsensus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Emma S. 2006. Menteri Pemerdayaan Perempuan *Jurnal Perempuan*. 09.
- Anderson, J.E. 1975. *Public Policy Making*. London: Nelson.
- Anderson, Mary B. 1988. "Kenya: Kitui District Arid and Semi-Arid Lands Project". Hal. 309-326 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Arias, Maria E. dan John Ickis. 1988. "Peru: Banco Industrial del Peru, Credit for the Development of Rural Enterprise". Hal. 243-282 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Arjani, Ni Luh, I Nyoman Suparwa, I Ketut Sudantara. 2006. *Kembang Rampai*. Denpasar: CV Karya Sastra
- Baneria, L. 1979. "Reproduction, Production, and the Sexual Division of Labour". *Cambridge Journal of Economics* No.23, hhal. 203-225.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall
- Budiman, Arief. 1981. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiman, Arief. 1991. "Ketergantungan Perempuan dan Manifestasinya: Kajian Pustaka". Hal. 19-27 dlm. Hesti R. Wijaya et al. (ed.), *Kemandirian Perempuan Indonesia: Citra Kemandirian Perempuan Indonesia*. Malang: Kelompok Studi Wanita, Puslit Unibraw.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Carroll, J.B. 1956. *Language, Thought and Reality: Selected Writing of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge: The MIT Press.
- Coates, J. 1991. *Women, Men, and Language : A Sociolinguistic Account of Sex Differences in Language*. London & New York : Long Man

- Cozens, J. & M. West. (eds.). 1991. *Women in Work, Psychological and Organizational Perspective*.
- Davidson dan Cooper. 1992. *Women on Business*.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Perempuan dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall
- Edwards III, G.C. & I. Sharkansky. 1978. *The Policy Predicament*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Faisal, Sanapiah. 2003. "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif". Hal. 64-81 dlm. Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Anik dan Musdah Mulia. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fernandes, W. 1993. *Riset Partisipatoris Pembebasan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Friedmann. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Mass-Black Well Publisher.
- Giddens, Anthony. 1985. *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim, and Max Weber*. London: Cambridge University Press.
- Gopinath, C. dan A.H. Kolaro. 1988. "India: Gujarat Medium Irrigation Projects". Hal. 283-308 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Project: A Case Book*. Connecticut: Kumarian Press.Inc
- Grindle, M. (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hariwijaya, M. 2007. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta:elMATERA Publishing
- Hijab, Nadia. 1988. *Womenpower*.

- Holt, Claire ed. 1972. *Culture and Politic in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Irwan, Abdullah. 2001. *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan* . Yogyakarta: Tarawang.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jackson, Karl D. and Lucien Pye.1978. *Political Power and Communication in Indonesia*. Boston: Boston University Press.
- Jensen, G.D. & L.K. Suryani. 1992. *The Balinese People: Reinvestiation of Character*. Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, G.D. & L.K. Suryani. 1996. *Orang Bali*. Bandung: ITB & Unud.
- Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Jonson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid I. Jakarta: PT Gramedia
- Kementrian Pemerdayaan Perempuan. 2002. *Modul Pengarusutamaan Gender*.
- Kurniawan A.S, Bachtiar. 1999. *Peran Perempuan dalam Filantropi dan Masyarakat Sipil*.
- Kuntjara, Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan: Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kweldju, S. 1993. "Penelitian Seksisme Bahasa dalam Kerangka Penelitian Steriotipe Seks". *Warta Studi Perempuan* Vol.4, No.1 m hal 7-18.
- Lengermann, Patricia M. & Jill Niebrugge-Brantley. 1988. "Contemporary Feminist Theory". Hal. 282-325 dlm. George Ritzer, *Contemporary Sociological Theory*.Edisi II. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Lestari, IGA Mas Seri P. 2008. *Kesiapan Perempuan Memasuki Dunia Politik*.
- Liddle, Williem. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik : Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti Press.
- Lincon, Y.S. dan E.G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: Sage Publication.
- Littlejohn, S.W. 1996. *Theories of Human Communication*. Editi V. Belmont, California: Wadsworth.

- Lubis, T. Mulya 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Mahmada, Nong Darol. 2007. *Masalah Gender dan Politik Seksual*. Bandung: Freedom Institute.
- Masyhadi, Anisia Kumala (2002), *Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemerdayaan Perempuan Modern*, Grahamedia, Jakarta.
- Mayo, Henry B. 1960. *Intruduction to Marxist Theory*. New York: Oxford University Press.
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier (eds), 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.
- Mead, Margaret and Samoa. 1998. *Women and Culture in Samoa*.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong Lexi, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posda Karya.
- Moscovisi, Serge & Willem Doise. 1994. *Conflict and Consensus, a General Theory of Collective Decisions*. London: Sage Publications.
- Mosse, Julai Cleves. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, H.M., Sajida Atho, S. Alvi , Saporinah Sadli. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noerdin, Edriana. 2005. *Politik Identitas Perempuan Aceh*. WRI.
- Nursjahbani, K. 1999. *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: LBH APIK.
- Oka, Jasmin. 2002. *Garis Baru Bagi Perjuangan Wanita Indonesia*.
- Overholt, C, M.B. Anderson, K. Cloud, J.E. Austin. 1988. "Women in Development : A Framework for Project Analysis". Hal. 3-16 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Projects : A Case Book*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Pitana, I Gde. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar:BP

- Pujiyono, Bambang. 2004. "Mengefektifkan Peran Politik Formal Perempuan". *Jurnal Perempuan*, 7.
- Putra, Fadillah. 2002. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, I Nyoman Darma. 2003. *Wanita Bali Tempo Doeloe Perspektif Masa Kini*. Gianyar: Yayasan Bali Jani.
- Pyle, David. 1988. "Indonesia: East Java Family Planning, Nutrition, and Income Generation Project". Hal 135-162 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Projects : A Case Book*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Rahayu, Ruth I. 1996. "Politik Gender Orde Baru : Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an". *Prima XXV/5*, Mei, hal. 29-42.
- Ritzer, George. 1988. *Contemporary Sociological Theory*. Edisi II. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Santosa, Panji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Santoso, Purwo Workshop Multistakeholder *Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif* yang diselenggarakan oleh Jogjakarta Transparency, bekerja sama dengan Independent Legal Aid Institute (ILAI) dan Partnership for Governance Reform di Hotel Novotel Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2003.
- Satu, Wanita. 2001. "Meningkatkan Wakil Perempuan di Legislatif". *Kompas*, 23 April 2001.
- Sawyer, Susan & Catherine Overholt. 1988. "Dominican Republic: Program for Development of Microenterprises". Hal. 215-242 dlm. Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, James E. Austin (eds), *Gender Roles in Development Projects : A Case Book*. Connecticut: Kumariah Press, Inc
- Seda, Eri, 2002. *Jender ke dalam Gerakan Filantropi*.
- Soethipto, Ani. 2004. "Perempuan dan Politik : Suatu Analisa Krisis". *Kompas*
- Soetrisno, Loekman, 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemerdayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spender, D. 1980. *Man Made Language*. London : Routledge & Kegan Paul.
- Subarsono, A.G, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemerdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiada, I Nyoman, 2002. *Politik Gender Orde Baru dan Keterpinggiran Perempuan Bali dalam Kancah Politik*.
- Sukirno, Sodono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bina Grafika, LPFE-UI.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryani, Luh Ketut 2002. "Balinese Women in a Changing Society". *Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry*, Vol. 32.
- Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Kini*. Bali:BP.
- Susanto, I.S. 1993. "Hak Azasi Manusia dalam Perpektif Sosiologi". Makalah *Seminar Nasional Hak-hak Manusia di Undip*.
- Suwarsono & Alvin Y. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta:LP3ES.
- Swarsi, 1985. *Perempuan dalam Hukum Hindu*.
- Tinker, Irene. 1990. "The Politics Of Women in Development". *Inequalities: Women and World Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Tong, Rosemarie Punam. 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Edisi II. Colorado: Westview Press.
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant As a Public Policy in Africa.*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- Ulfah. 2005. "Partisipasi Perempuan dalam Politik". Hal.83-85 dlm. Hesti Ariwulan & Dian Noeswantari (ed.), *Menggugat Hak Politik Perempuan*. Surabaya: Konsorsium Swara Perempuan (KSP) & The Ford Foundation Jakarta.
- Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*.
- Van Peursen, C. 1984. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Venny, Adriana. 2006. "Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia". *Jurnal Perempuan* No.48, hal. 4-5.